

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG ATAS
PENCORETAN DAFTAR CALON TETAP OLEH KPU PROVINSI
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

PENI PEBRIYANTI

NPM : 1621020083

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020 M

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG ATAS
PENCORETAN DAFTAR CALON TETAP OLEH KPU PROVINSI
LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Peni Pebriyanti

Npm : 1621020083

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni. S.H., M.H

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, M. Ag

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020 M

ABSTRAK

Sumber pelanggaran pada tiap peraturan adalah proses Pemilu yang selalu berujung perkara dihadapan peradilan, baik dari awal proses pendaftaran hingga pada tahap perhitungan suara yang selalu diwarnai pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran administrasi di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif yang ditemukan oleh pengawas Pemilu merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah atau BUMD yang diketahui setelah ia ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif sehingga diputuskan penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi Lampung untuk dicoret, namun pada Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2019 justru mengabulkan permohonan untuk dikembalikan dalam daftar DCT. Maka masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dan dampak yuridis dari Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Lampung. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Lampung. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dan dampak yuridisnya dari putusan Mahkamah Agung yakni Yurisprudensi MA No 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Lampung serta pandangan hukum Islam terhadapnya. Kegunaan penelitian adalah agar dapat mencegah terjadinya penerapan putusan yang tidak menerapkan dan menjalankan peraturan-peraturan undang-undang sebagaimana mestinya dan mencegah pergeseran makna keadilan. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 masih banyak menimbulkan pertanyaan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon memanglah adil untuk Pemohon tapi tidak adil secara keseluruhan karena menimbulkan tumpang tindihnya peraturan, dampak yuridisnya undang-undang Pemilu dan peraturan KPU itu akan diragukan oleh masyarakat tentang kepastian hukumnya, serta berdampak pada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang kinerjanya akan diragukan oleh masyarakat luas karena hasil putusannya yang selalu diperkarakan. 2. Dalam pandangan Hukum Islam dari hasil Yurisprudensi MA. No.9 P/PAP/2018 telah sesuai dari segi pemenuhan hak politik untuk pemohon dan pemenuhan amanat dalam prinsip negara hukum dalam Islam. Hanya saja ketidak jujuran dari Pihak Pemohon pada awal proses pendaftaran menjadi dasar hilangnya sifat adil atau kebersihan atas dirinya sebagai syarat keanggotaan *Ahlul Hilli Wal Aqdi* atau dikenal sebagai Anggota legislatif dan termasuk kedalam salah satu sifat munafiq yaitu apabila berbicara berdusta, yang sangat dilarang dalam Islam sehingga pencoretan tersebut diperbolehkan dalam islam dengan memperhatikan hal tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Peni Pebriyanti

NPM : 1621020083

JURUSAN : Siyasah (Hukum Tata Negara)

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
ATAS PENCORETAN DAFTAR CALON TETAP OLEH KPU
PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 November 2019

Saya yang menyatakan,

Peni Pebriyanti

NPM. 1621020083



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : Peni Pebriyanti
Npm : 1621020083
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
AGUNG ATAS PENCORETAN DAFTAR CALON
TETAP OLEH KPU PROVINSI LAMPUNG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Yurisprudensi
MA No. 9 P/PAP/2018)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini. S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Gandhi Liyora Indra, M. Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frengki, M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG ATAS PENCORETAN DAFTAR CALON TETAP OLEH KPU PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018)" Disusun oleh : **Peni Pebriyanti, NPM : 1621020083,**
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Pada hari Rabu, 12 Februari 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua

: Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

Sekretaris

: Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama

: Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing I

: Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II

: Ghandi Liyorba Indra, M. Ag

Dekan



Dr. H. Khairuddin, M.H

196210221993031002

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿٩٠﴾

“Sungguh, Kami telah Menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”
(QS An-Nahl (16) : 90)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta untuk Abiku Ibrahim dan tentunya ibuku Paridawati yang senantiasa mendoakan ku setiap waktu yang telah rela dan sabar membesarkanku, mendidik dan merawatku sejak dalam kandungan sampai aku sebesar ini. Berkat ketulusan doa keduanyalah penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga gelar yang aku dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orangtuaku.
2. Kepada adik-adik kembarku Verry Rahmat Saputra dan Verra Septa Anggraini karena merekalah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Zuhraeni. S.H., M.H dan Pembimbing II Bapak Gandhi Liyorba Indra, M. Ag yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Zainudin Hasan, S.H, M. H, selaku dosen Fakultas Syari'ah yang turut serta membimbing dan memberikan arahan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat ku Saras Salsabila, Wahyu Ismail, Diajeng Raviva, Sudirman, Widona, Nurkharisma Dewi, Nurmala Viatama, Fiky Amalia, Putri Zairina dan semua yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian yang selalu memotivasiku dan membantuku dalam setiap keadaan.

6. Teman-temanku satu angkatan 2016 di Siyasah B terimakasih karena kalianlah masa kuliah ku berarti dan penuh warna.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Peni Pebriyanti, penulis dilahirkan di Kota Gajah pada tanggal 28 Februari 1998, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Ibrahim dan Ibu Paridawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK IT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2004, setelah itu penulis melanjutkan studi di SD IT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di SMP IT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan studi di MAN 1 Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah).

Bandar Lampung, 21 November 2019

Peni Pebriyanti

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG ATAS PENCORETAN DAFTAR CALON TETAP OLEH KPU PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018) sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

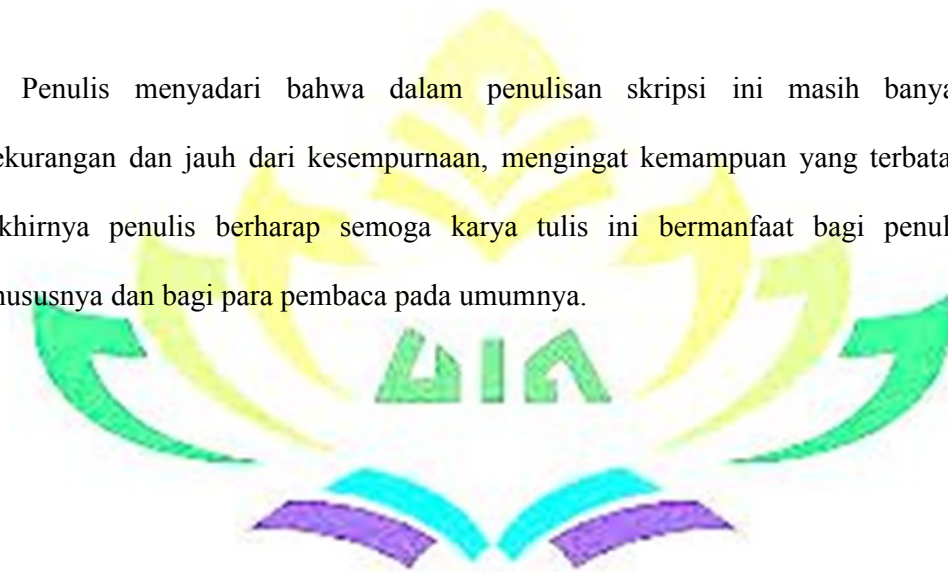
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M. Si Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H dan Bapak Ghandi Liyorba Indra, M. Ag, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tecinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II BEBERAPA ASPEK HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK DAN PENCALONAN LEGISLATIF

A. Kajian Teori	
1. Pengertian Hak Politik dalam Hukum Islam	16
2. Teori Persamaan Hak dalam Syari'at Islam	20
3. Norma Hukum dalam Fiqh Siyasah mengenai Sengketa Pencalonan Legislatif	25

4. Konsep Siyasah Dusturiyah mengenai Hak Politik dalam Pencalonan Legislatif.....	51
Hak Politik dan Pencalonan Legislatif Perspektif Hukum Positif	
1. Pengertian Hak Politik dalam Hukum Positif.....	52
2. Macam-macam Hak Politik Warga Negara.....	57
3. Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pencalonan Legislatif.....	65
B. Tinjauan Pustaka	95

BAB III YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO.9 P/PAP/2018

A. Gambaran Umum Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.9 P/PAP/2018	98
1. Tentang Pokok Perkara.....	101
2. Pemohon dan Kepentingan Hukum	105
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Perkara.....	108
4. Amar Putusan.....	110

BAB IV ANALISIS DATA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dan Dampak Yuridis dari Yurisprudensi MA No 9 P/PAP/2018 Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung	112
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi MA No 9 P/PAP/2018 Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi	
C. Lampung	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Rekomendasi	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018

Lampiran 2 Blangko Konsultasi

Lampiran 3 Hasil Turnitin Skripsi



DAFTAR TABEL

Tabel 1

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum	78
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai awal mula untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (MA) atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi MA No.9 P/PAP/2018). Adapun uraian pengertian beberapa dalam judul ini yaitu, sebagai berikut:

1. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya,¹ dan Mahkamah Agung (MA) salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² Jadi, Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung merupakan penyelidikan terhadap alasan-alasan hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusannya.

¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h. 60

² Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Lampung

Daftar Calon Tetap anggota yang selanjutnya disebut DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.³ Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁴ Jadi, pencoretan DCT oleh KPU Provinsi Lampung merupakan penghapusan atau dihilangkannya nama calon anggota legislatif yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam islam atau yang dikenal dengan istilah *syari'ah*.⁵ Adapun lafaz *Syari'ah* secara bahasa sebagaimana termuat dalam suatu kamus ensiklopedi dan referensi tertentu menunjukkan arti yang sama dan senada yaitu diartikan *sunnah* atau jalan.

³ Pasal 1 ayat 47 PKPU No 9 Tahun 2019

⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 6

⁵ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018) h. 9

Sedangkan lafaz *Syari'ah* secara istilah menurut Ibnu Taimiyah r.h.a, adalah ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Jadi, *Syari'ah* merupakan suatu ketetapan hukum yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi sebagai sumbernya.⁶

4. Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.⁷Jadi, Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 merupakan putusan pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung hasil dari pertimbangan hakim atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi ini adalah kajian mengenai analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung (MA) atas pencoretan Daftar Calon Tetap yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Yurisprudensi MA No.9 P/PAP/2018).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif : Karena dunia perpolitikan terutama dalam hal pemilu selalu diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya baik peserta pemilu maupun badan-badan yang

⁶ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11

⁷Yurisprudensi(On-Line)"<http://www.pa-subang.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>" (15 Februari 2020)

menyelenggarakan, salah satunya adalah pelanggaran administratif dan putusan-putusan terhadapnya yang perlu dikaji lebih spesifik.

2. Alasan Subjektif : Pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari, dan selain menarik untuk dikaji juga tersedianya literatur yang mendukung untuk dilakukannya penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter dari bangsa Indonesia yang telah berlangsung dan berkembang selama berabad-abad lamanya. Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya sebagai sumber peraturan-peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.⁸

Legitimasi hukum yang dimaksud dalam Pancasila dimana pelaksanaan dan penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan prinsip legalitas. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹ Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “*Nomokrasi Islam*”, konsep negara

122 ⁸ Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, Cet-Kesatu) h.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

hukum “Socialis Legality”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹⁰

Berdasarkan pada pengertian negara hukum tersebut maka keadilan sebagaimana termaktub dalam sila ke-5 Pancasila merupakan tujuan dalam kehidupan bernegara yang dilihat dari penerapan kebijakan, kewenangan pemerintah dan putusan-putusan yang erat kaitannya dengan pemberlakuan hukum haruslah berdasarkan hukum yang berlaku dan adanya kepastian hukum yang menjamin penerapan hukum itu telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta keadilan menyeluruh baik bagi seluruh warga negara Indonesia dan pihak-pihak maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan.

Pemerintahan di Indonesia sampai sekarang ini menerapkan sistem demokrasi, hakikat demokrasi merupakan sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan yang mana ini direalisasikan melalui mekanisme pemilu demokratis.¹¹ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada sistem politik demokrasi ini lumrahnya merupakan pembuatan kebijakan publik dengan mengedepankan suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih melalui pemilu.¹²

¹⁰ Aloysius R.Entah, Journal “Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016. h. 533

¹¹ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015) h. 81

¹² Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) h. 3

Namun dalam realisasinya selalu ditemukan ketidak sesuaian dalam praktik pemilu.

Pemilu adalah salah sarana perpolitikan dalam meraih kekuasaan yang didalamnya merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satunya mengisi kursi menjadi wakil rakyat dalam lembaga legislatif yang membuat banyak partai politik yang mengajukan daftar calon demi mengisi kursi-kursi tersebut untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi rakyat, Terutama pada pemilu 2019 ini, yang tentunya dalam pencalonan tersebut terdapat tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yang telah diatur dalam Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Disinilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini KPU diartikan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu untuk menjamin Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, selain sebagai pengawas Pemilu juga

melakukan pengawalan terhadap Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas merupakan eksistensi dari adanya Bawaslu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini terutama dari segi pencalonan legislatif banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama yang menjadi sorotan dalam skripsi ini adalah adanya pelanggaran administratif yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pengawasannya dan ditindak lanjuti oleh KPU.

Pelanggaran itu dilakukan oleh salah satu daftar calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama H. Rifa'i, S.H. sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung yang oleh Bawaslu ditemukan bahwa beliau masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dan hal ini bertentangan dengan pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan

Negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.¹³

Berdasarkan temuan tersebut KPU mengeluarkan keputusan untuk mencoret H. Rifa'i, S.H., sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut dari laporan Bawaslu. Namun dalam hal ini H. Rifa'i, S.H., merasa keberatan dengan keputusan KPU tersebut dan mengajukan ke Mahkamah Agung dalam kamar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memutus hal tersebut.

Berbagai pertimbangan hakim akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yakni yurisprudensi MA No 9 P/PAP/2018 yang isinya mengabulkan permohonan M. Rifa'i, S.H., untuk membatalkan keputusan KPU tersebut. Dan menurut penulis dengan adanya putusan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap ketidakpastian peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu 2019, tumpang tindih peraturan satu dengan peraturan yang lain serta penerapan keadilan yang dirasa belum sepenuhnya terpenuhi dengan adanya putusan tersebut.

Dan dalam hukum Islam yang karakteristik ajarannya bersifat komprehensif, yang mencakup segala aspek kehidupan didalamnya juga memandang terkait dengan masalah tersebut, dalam islam menganjurkan ketika memutus suatu perkara haruslah mendatangkan keadilan bagi para pihak, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

¹³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا صَبِيرًا ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

Dalam ayat ini berisi perintah Allah SWT yang diantaranya bila menetapkan hukum diantara manusia yang berselisih maka menetapkannya dengan adil, berisi ketentuan kepada para hakim dalam memutus perkara dalam pertimbangannya haruslah mendatangkan keadilan secara menyeluruh dan membawa kebaikan bagi seluruh pihak karena ajaran Allah SWT kepada umatnya yang telah disampaikan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.9 P/PAP/2018 yang menciptakan pro dan kontra didalamnya maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut menurut perspektif Hukum Islam, dengan judul :
“Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam” (Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S An-Nissa (58)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan MA No. 9 P/PAP/2018, dan melihat pandangan hukum Islam terhadap yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dan Dampak Yuridis dari Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dan dampak yuridis dari yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan DCT oleh KPU Provinsi Lampung perspektif hukum Islam.
2. Untuk memenuhi persyaratan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya penerapan putusan yang tidak menerapkan dan menjalankan peraturan-peraturan undang-undang sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya

pergeseran makna keadilan karena tumpang tindihnya antara aturan yang satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan keraguan dalam masyarakat dengan lembaga peradilan yang ada serta dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 terkait pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung. Secara teoritis, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu Hukum Tata Negara dan Politik (Siyasah). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bacaan di lingkungan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) khususnya civitas akademik UIN Raden Intan Lampung pada umumnya serta semua pihak-pihak yang berkepentingan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas pencoretan Daftar Calon Tetap yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang, norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif tertulis.¹⁶ Penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Penelitian ini mencakup penelitian pada taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal sesuai dengan hierarki perundang-undangan maupun undang-undang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum mengenai yurisprudensi MA No 9 P/PAP/2018 atas pencoretan DCT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur'an, Hadist, buku-buku fiqh, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Yakni data yang dapat menunjang penelitian, yang berupa buku-buku ilmiah, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, catatan atau laporan historis yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah, surat kabar, artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 13

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi dan diperbaiki.¹⁸

b. Koding

Koding adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁹

c. Rekontruksi Data

Rekontruksi Data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistemasi Data

Sistemasi Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h.182

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h. 107

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 126

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih satu sama lain, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang tertinggal, semuanya masuk dalam analisis. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²¹

²¹ *Ibid*, h. 127

BAB II

BEBERAPA ASPEK HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK DAN PENCALONAN LEGISLATIF

A. Hak Politik dan Pencalonan Legislatif Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak Politik dalam Hukum Islam

Dalam Islam hak politik merupakan suatu pengakuan hak yang setingkat dalam kedudukannya sebagai warga negara. hak-hak yang dimaksud berupa hak partisipasi dalam lingkup pemerintahan, mengajukan pendapat, saran maupun kritik, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik dan sebagainya, yang tentulah hal demikian patut didapatkan oleh warga negara. dalam pandangan hukum Islam pembahasan mengenai politik memang sangat hangat, ditambah lagi Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan sistem politik tertentu tapi hanya menjelaskan bahwa suatu pemerintah yang baik berdasarkan pada asas keadilan, persamaan dan pertanggung jawaban.

Menurut Islam pemerintahan adalah wakil (*khalifah*) dari Yang Maha Pencipta alam semesta, tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu melainkan kepada seluruh masyarakat Islam, Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 55 mengatakan :¹

¹ Mulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Human Right in Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmata, S.H, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 39

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
 فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
 دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
 يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٢٨﴾

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan Menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan Meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia Ridai. Dan dia benar-benar Mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) Menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa tetap (kafir) setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”²

Ayat diatas jelas mengatakan bahwa *Khilafa* adalah karunia bersama dari Tuhan di mana hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak kurang dari hak orang lain.

Metode yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk menjalankan negara adalah dilakukan dengan musyawarah antar sesamanya. Menurut prinsip ini, adalah hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih oleh Muslim lain untuk ikut serta menjalankan urusan negara. *Syura* atau majelis legislatif harus mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut :

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 285

1. Kepala eksekutif pemerintahan dan anggota-anggota mejlis harus dipilih melalui pemilihan bebas dan independen oleh rakyat.
2. Rakyat dan wakil-wakilnya harus memiliki hak untuk mengkritik dan mengemukakan pendapat mereka secara bebas.
3. Keadaan riil dari negara harus dikemukakan kepada rakyat tanpa ada fakta yang disembunyikan sehingga rakyat dapat memutuskan apakah pemerintahannya telah bekerja baik atau tidak.
4. Harus ada jaminan yang kuat bahwa orang-orang yang memperoleh dukungan rakyat yang akan mengatur negara dan mereka yang tidak memperoleh dukungan ini harus meletakkan kedudukan berkuasanya.

Dalam keadaan apapun Islam tidak membolehkan seorang individu atau kelompok atau suatu partai mencabut hak-hak sebagian besar Muslim dan merebut kekuasaan negara. Islam pun tidak membenarkan jika individu membentuk majelis legislatif yang palsu yang memakai cara seperti taktik kecurangan, penganiayaan, penyuapan dan sebagainya, sehingga bisa mendudukkan dirinya dan orang-orangnya, pilihannya, dalam majelis itu. Tindakan ini bukan saja berupa pengkhianatan terhadap rakyat yang hak-haknya dirampas secara ilegal, tetapi begitupun terhadap Yang Maha Pencipta yang telah mempercayai orang-orang Muslim untuk mengatur dunia atas nama-Nya.

Secara singkat hak-hak politik dalam hukum Islam mencakup hal sebagai berikut :³

1. Kebebasan memilih dan dipilih : setiap warga negara dalam Islam memiliki hak yang sama yaitu memilih pemimpinnya dan dipercayai untuk dipilih juga untuk keikutsertaannya dalam pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang menjamin rakyatnya turut serta dalam Pemilu. Hasan al-Bana mengkritik sistem pemilihan langsung ini yang selalu ditemukan banyak kekurangan dan perlunya perbaikan, diantaranya :
 - a. Menyebutkan kriteria orang-orang yang akan dipilih sebagai calon legislatif.
 - b. Memperbaiki aturan pelaksanaan pemilu dan sosialisasinya, karena masalah peraturan ini sering dipermainkan oleh ambisi partai dan kepentingan pemerintah.
 - c. Jika pemilihan dilakukan dengan memilih tanda gambar dan bukan memilih orang itu lebih baik, sehingga calon legislatif tidak dapat memaksa para pemilihnya dan kepentingan umum akan dapat diletakkan di atas kepentingan pribadi dalam menilai dan berhubungan dengan orang yang akan dipilih.
2. Membuat dan mengajukan usulan petisi : Petisi adalah surat permohonan resmi kepada pemerintah. Petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta

³ Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Bana*”, Jurnal, 258 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 245-270

agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Hasan Al-Banna juga berpendapat bahwa Islam juga memiliki hak petisi yang harus diperjuangkan, dan hak Islam juga harus terpenuhi. Disebabkan Islam pada dasarnya merupakan sistem sosial internasional, memberi jaminan kepada manusia dengan adanya kebaikan dan kebahagiaan, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

2. Teori Persamaan Hak dalam Syariat Islam

Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem berpolitik musyawarah yang menerapkan prinsip persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutnya dalam perundang-undangan sejak lebih 14 abad silam. Syari'at Islam berbeda dengan lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah sempurna antara individu dan rakyat.

Kaidah-kaidah syari'at itu umum dan komprehensif untuk seluruh kaum muslimin dan ijma' pun mengatakan bahwa hukum kaum muslimin seluruhnya sama. Rasulullah Saw bersabda : *“Manusia itu sama bagaikan gigi-gigi sisir.”* (HR. Al-Qadha' dalam musnad Asy-Syihab). Allah menciptakan manusia dengan setiap hak yang sama pula, tidak dibedakan, yang membedakan hanyalah taqwa mereka.

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. sebagaimana disebut oleh Sayyid Qutb sebagai asas keadilan dalam Islam.

Apabila umat manusia itu anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. (Al isra : 70) Rasulullah juga bersabda :

“Wahai manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketaqwaan.” (HR. Ahmad)⁴

Allah Swt juga berfirman kepada seluruh umat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dengan firman yang sama, dan diutusny Rasulullah Saw kepada umat juga dengan pengutusan yang sama pula. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak ada perbedaan antara budak dan orang merdeka. Semua disisi Allah adalah sama.⁵

1. Persamaan Hak dihadapan Undang-undang

Prinsip Persamaan hak dan lainnya dari prinsip konstitusional dan etika-etika tinggi yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dalam dua sumbernya, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah, dianggap dasar-dasar yang baku. “Al-Qur’an adalah sumber dasar dan As-Sunnah adalah sumber penjelas.

Ketika pegangan umat Islam kepada undang-undang dasar Tuhan dan syari’at Islam juga telah mewajibkan untuk selalu komitmen dengan perintah-perintah-Nya dan larangan-larangan-Nya, memperhatikan halal dan haramnya, merasa dekat dengan Allah disetiap keadannya, secara

⁴ Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasah, Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*, (Solo: Era Adicitra, 2010), h. 56

⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarya : Amzah : 2005), h. 232

khusus dan secara umum, tampak dan tersembunyi, dan mereka mempunyai contoh juga panutan pada diri Rasulullah saw, yang akhlak beliau adalah Al-Qur'an sebagaimana digambarkan dimasa pemerintahannya yang lurus untuk menjadikan prinsip persamaan hak antara individu umat Islam dengan segenap perbedaan antara mereka baik kaya atau miskin, kuat atau lemah, baik yang terdahulu masuk Islam atau baru masuk Islam dan seterusnya sebagai hakikat yang nyata, sebab dia bersumber dari asal akidah Islam yang menyempurnakan bagi syariatnya. Semua tunduk pada syariat dan undang-undang-Nya sekalipun *khalifah* sendiri.

Sejarah memaparkan kepada kita begitu banyak bukti nyata komitmen kaum muslimin dengan prinsip persamaan hak secara mutlak, tidak mengenal pengecualian atau pluralisme interaksi antara individu manusia, dengan sebab kondisi, atau pertimbangan apapun. Diantara contohnya adalah penolakan Rasulullah saw terhadap Usamah bin zaid yang diutus oleh kaum seorang perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian, dengan tujuan untuk memintakan keringanan dari Rasulullah saw, dalam menjatuhkan hukuman atasnya. Rasulullah saw bersabda kepadanya : *Hai Usamah, apakah engkau memintakan keringanan dalam suatu keputusan dari keputusan-keputusan Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, pasti akan aku potong tangannya.*

Juga kejadian seorang penduduk Mesir dengan seorang anak Amr bin Ash, ketika kedua orang itu mengadakan perlombaan pacuan kuda, dan kuda orang Mesir itu yang menang. Ketika itu terjadi perselisihan anatar mereka berdua anak anak Amr bin Ash memukul laki-laki Mesir itu. Laki-laki Mesir itupun mengadukannya kepada Umar, maka Umar memutuskan laki-laki Mesir itu boleh memukul anak penguasa Mesir saat itu. Umar berkata : *“Silahkan engkau membalas pukulan anak orang mulia ini, maka laki-laki Mesir itupun memukulnya dengan sangat keras.”*

Kejadian ini dan kejadian seumpamanya merupakan saksi nyata bahwa prinsip-prinsip mendasar seperti persamaan hak didahulukan dalam tangga etika Islam atas setiap pertimbangan politik maupun agama. dan tidak heran bahwa syari'at Islam menempatkan prinsip persamaan hak juga prinsip-prinsip konstitusional dan etika tinggi mendasar yang telah ditetapkan oleh sumber-sumber syariat ini dikedudukan yang tinggi dan menjadikannya diperingkat teratas setiap kemaslahatan.⁶

2. Persamaan hak dihadapan Peradilan

Sebagaimana islam menetapkan persamaan hak setiap individu rakyat dihadapan undang-undang, maka Islam juga menetapkan bahwa mereka juga sama didepan peradilan. Dalam syariat Islam, pemeriksaan perkara para *khalifah* dan raja-raja juga dilakukan didepan peradilan biasa dan dengan cara biasa pula. Pada masa *kekhalifahan* Ali bin Abi Thalib ia pernah kehilangan baju besinya dan tak lama kemudia ia temukan baju

⁶ *Ibid*, h. 237

besinya itu ada bersama orang yahudi, yang ia mengakui bahwa baju besi itu adalah miliknya. Orang yahudi itu lalu mengadukan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan memenangkan orang Yahudi atas khalifah Ali ra. Begitu juga dengan Mughirah Gubernur Kufah. Dia dituduh perbuatan zina, maka perkaranya itun pun diperkarakan dengan cara-cara biasa.

Sebagian perselisihan yang terjadi antara *khalifah* atau para pejabatnya dan setiap individu rakyatnya ada yang diputuskan dengan murni keagamaan, yaitu dengan cara tahkim, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatab, waktu itu, ia meminjam seekor kuda dari seorang laki-laki dalam keadaan bagus, namun saat ia mengembalikan kuda itu dalam keadaan sakit. Maka laki-laki itupun memperkarakan hal itu. Lalu Umar berkata : “ Tunjuk seorang sebagai hakim, untuk memutuskan perkara ini, “Laki-laki itu berkata : “ Aku menunjuk Syuraih Al-Iraqi sebagai hakim”.

Setelah mendengar keterangan dari Laki-laki itu dan dari Umar, Syuraih berkata kepada Umar :” Engkau meminjamnya dalam keadaan sehat dan bagus, maka engkau bertanggung jawab atasnya hingga engkau mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagus pula. “Keputusan inilah yang mendorong Umar mengangkatnya sebagai hakim agung.

Para hakim dimasa awal sejarah islam, sebagian besar mereka bekerja secara independen dan jauh dari politik, sekalipun tingkatan mereka merosot drastis diakhir masa dinasti Abbasiyah akibat kekerasan para penguasa, hingga mengakibatkan mundurnya sebagian besar orang-orang

yang *wara'* (orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan tidak berlebihan dalam hal-hal yang halal) dari jabatan hakim. Diantaranya Abu Hanifah dan lain-lainnya dari para sahabat dan para *tabi'in*.

Sesungguhnya umat yang rasulnya mempersilahkan manusia untuk membalas tindakan pada dirinya. “Umat yang *khalifah* nya menyamakan dirinya dengan setiap individu rakyat, malah menyatakan didepan khalayak ramai bahwa dia diangkat untuk memimpin perkara rakyat padahal dia bukanlah orang yang terbaik dari mereka, menyatakan bahwa ia tidak berbeda dari individu rakyat lainnya, dan para hakim agung berhak memberhentikannya, juga prajurit berhak membalas tindakan zalim *amir* nya. Umat yang hakim-hakimnya memutuskan perkara dengan keputusan yang tidak menguntungkan para pejabat dan para *amir*, dan mereka menuruti semua hukum yang dijatuhkan kepada mereka dengan penuh ketundukan dihadapan pengadilan yang adil dan dihadapan para hakim yang penuh keluhuran.⁷

3. Norma Hukum dalam Fiqh Siyasah mengenai Sengketa Pencalonan Legislatif

Secara bahasa kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam.” Lalu Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan “Fiqh tentang sesuatu” yang berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya. Dalam Al-Qur'an kata

⁷ *Ibid*,

“*faqaha*” disebutkan 20 kali, 19 kali dan digunakan dalam arti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Dalam hal ini berbeda dengan ilmu yang berbentuk pasti (*qath’i*), Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tak pasti (*zhanni*). Dan secara istilah Fiqh diartian :⁸

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”

Maka dari semua definisi yang telah disebutkan dapat ditarik pengertian Fiqh sebagai “upaya yang bersungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ untuk dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh mencakup seluruh aspek kehidupan, baik mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan (*ibadah*), dan mencakup hubungan antara sesama manusia luas (*Muamalah*).

Sedangkan kata “*Siyasah*” berasal dari *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Yang kesemuanya merujuk kepada tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis. Sebagaimana menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil yang menyampaikan pengertian *siyasah* secara terminologis : “*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), h. 2

menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.⁹

Siyasah merupakan pengurusan kepentingan-kepentingan umat yang sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *Siyasah* adalah kemunculan dampak positif dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan yang kesemuanya untuk kepentingan masyarakat meskipun semua itu tidak didasarkan oleh Al-Qur'an ataupun As-Sunnah terutama yang berkaitan dengan masalah dalam pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal pemenuhan kewajiban, hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan itu sendiri merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.¹⁰

Maka dari kesemuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan manusia itu sendiri. Ruang lingkup Fiqh Siyasah terdapat tiga bagian pokok:¹¹

1. *Siyasah Dusturiyyah* : Bagian ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum (*tasyri' iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan

⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 9

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h. 27

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, h. 15

(*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif.

2. *Siyasah Dauliyah* : Politik luar negeri, mencakup hubungan keperdataan internasional antara warga negara Muslim dengan non Muslim yang berbeda kebangsaan atau hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non Muslim atau disebut hubungan internasional.

3. *Siyasah Maliyyah* : Politik keuangan dan moneter, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan.

Lalu dalam pembahasan Fiqh Siyasah juga dikenal istilah *Siyasah Syar'iyah* yang mana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasar kepada syariat. Yang kemudian dipertegas oleh definisi dari Abdurrahman Taj yang merumuskannya sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari analisa definisi tersebut maka hakikat *siyasah syar'iyah* adalah :¹²

1. *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Poitik Islam*, h. 8

2. Pengurusan dan pengaturan ini dipegang oleh pemegang kekuasaan.
3. Tujuan dari pengaturan itu untuk terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*ijab al-mashalih wa daf al-mafasid*)
4. Pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.

Didalam *siyasah syar'iyah* terdapat pembahasan mengenai negara hukum didalamnya, yang secara sederhana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pemerintahannya. Disini penguasa tidak dapat bertindak semena-mena karena segala kebijakan politiknya dibatasi oleh undang-undang. Konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah* ini dikenal dengan *nomokrasi Islam*.

Dalam *nomokrasi Islam* kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan melainkan berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Penguasa hanya melaksanakan apa yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber syari'at. Dan dalam hal ini ijtihad diperbolehkan pada hal-hal yang tidak secara tegas dijelaskan dalam sumber syari'at tersebut. Ini berarti setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjawab persoalan kenegaraan.

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana *nomokrasi Islam* harus dijalankan

oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja, dan prinsip-prinsip itu adalah :¹³

1. Prinsip kedudukan manusia di bumi : dalam prinsip ini Allah menegaskan manusia itu diciptakan adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Maka dari itu, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya dari kehancuran.
2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah : dalam hal ini Allah memerintahkan supaya manusia melaksanakan amanah yang diembankan dipundaknya seperti dalam firman Allah Swt dalam surat *An-Nisa* ayat 58 :



 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang Memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁴

Dalam hukum islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena itulah yang kelak akan dipertanggung jawabkan kepada-

¹³ *Ibid*, h. 240

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 69

Nya. Kekuasaan yang dimiliki mestilah dijalankan dengan baik sesuai perintah Allah karena merupakan amanah.

3. Prinsip penegakan keadilan : didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia, karena jika keadilan sudah tidak ditegakkan maka keseimbangan itu tak akan tercapai bahkan akan menciptakan goncangan dalam kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *An-Nahl* ayat 90 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sungguh, Kami telah Menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.”¹⁵

Ada tiga konteks makna keadilan yakni : pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan satu sama lain, kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada, ketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dalam hadits Nabi Saw disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 76

¹⁶ Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasah, Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*, h.

4. Prinsip musyawarah : didalam Al-Qur'an menegaskan bahwa musyawarah sebagai pemegang peranan penting dalam hal pengambilan keputusan urusan umat. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan dalam Al-Qur'an tentang orang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Inilah tanda musyawarah sebagai prinsip penting dalam *nomokrasi Islam*.
5. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin : kewajiban mematuhi pemimpin pada urutan ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-nya. Namun kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif selama tidak bertentangan dengan perintah Allah.
6. Prinsip persaudaraan dan persatuan : Allah menegaskan bahwa umat beriman itu bersaudara yang dijelaskan dalam *Al-Hujurat* ayat 10. Setiap muslim diwajibkan untuk mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mendapat rahmat-Nya. Lalu dalam surat *Ali-Imran* ayat 103 berisi perintah Allah untuk umat Islam berpegang teguh pada agamanya agar tidak terpecah belah. Karena nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umatnya adalah persatuan.
7. Prinsip Perdamaian : Dalam surat *Al-Anfal* ayat 61 menjelaskan bahwa perdamaian haruslah diutamakan dalam kehidupan sesama umat, jalan tempuh lain yang dilakukan ketika umat Islam telah terusik yang boleh dilakukan semisal perang.

8. Prinsip *amar ma'ruf nahy munkar* : seperti yang tertera pada surat

Ali imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁷

Dalam ayat itu Islam mengajarkan umatnya agar saling menasehati dan mengawasi setiap kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan dimasyarakat.

9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan : pada prinsip ini setiap pemegang kekuasaan tidak diperkenankan mengangkat pejabat-pejabat negara dengan berdasar pada hubungan keluarga tetapi semua itu harus berdasar pada kemampuannya dan kejujuran. Dua syarat dari Allah untuk mengangkat seorang pejabat yaitu harus kuat yang berarti memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya dan dapat menjaga amanah yang dipegangnya, yang tertera pada surat *Al-Qashah* ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ^طإِنْ خَيْرٌ مِّنْ
اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 50

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹⁸

10. Prinsip Penegakan HAM : Hal yang begitu diperhatikan dalam *nomokrasi Islam* adalah penegakan terhadap hak asasi manusia ini, semua bentuk pelanggaran terhadapnya tidak dapat dibenarkan dalam Islam baik terhadap kaum muslim maupun non-muslim sekalipun. Salah satu hak asasi yang paling mutlak dimiliki adalah kebebasan dalam memilih agama sesuai keyakinannya.

Jika hal diatas merupakan prinsip-prinsip yang harus ada dalam konsep negara hukum dalam Islam atau *nomokrasi Islam*, maka pembahasan selanjutnya berkenaan dengan hukum itu sendiri yang dalam hal ini erat kaitannya dengan si pembuat hukum atau lebih dikenal sebagai badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki istilah dalam Fiqh Siyasah ataupun Politik Islam yakni *“Ahlul Hilli Wal Aqdi”*.

Al-ahl artinya orang yang berhak atau yang memiliki, *al-hall* berarti melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan, *Al-Aqd* berarti mengikat, mengadakan transaksi dan membentuk. Jadi jika didefinisikan *Ahlul Hilli Wal Aqdi* berarti orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkan jika dipandang perlu. Juga dikenal dengan istilah lain yaitu *ahlul ikhtiyar* dan *ahlul ijtihad*, pada dasarnya *Ahlul Hilli Wal Aqdi* adalah

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 310

wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan.¹⁹

Istilah *Ahlul Hilli Wal Aqdi* muncul pada praktik dimasa Rasulullah Saw dan Khalifah Ar-Rasyidin dan muncul pada kitab-kitab para ahli fikih dan ahli tafsir setelah masa Rasulullah Saw. Pada masa Abu Bakar dibidang peradilan selalu menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah dengan cara mengumpulkan para sahabat untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Pada masa itu pula pemilihan *Ahlul Hilli Wal Aqdi* tidak dilakukan melalui mekanisme pemilu melainkan dengan cara pemilihan spontan dengan melihat dari sisi pemahamannya terhadap agama, kecerdasannya dan keutamannya.

Tugas mereka tidak seputar bermusyawarah dalam perkara kenegaraan, mengeluarkan undang-undang untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin, namun mereka juga melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat kepada pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak dari Allah Swt.

Dasar dari *Ahlul Hilli Wal Aqdi* ini dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat *An Nisa* ayat 59 :²⁰

¹⁹ Ahmad Dzakirin, "Tarbiyah Siyasah, Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah, (Solo: Era Adicitra, 2010), h. 42

²⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 82

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص
 فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman Kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²¹

Dan pada Surat An Nisa ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
 الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ط
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا



“Dan apabila sampai pada suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu).”²²

Ulul Amri yang dimaksud pada ayat-ayat diatas menurut Syaikh

Mahmud Syaltul berkata : “Ulul Amri adalah para ahli pikir yang dikenal

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 69

²² *Ibid*, h. 72

oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli kepada kemaslahatan itu.”

Kemudian penulis *Tafsir Al-Manar* menguatkan lagi mengenai apa yang dimaksud dengan *Ulul Amri* ini, bahwa ia mewajibkan taat kepada *Ulul Amri* yang dalam hal ini merupakan *Ahlul Hilli Wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka semua itu terdiri dari para pemimpin dan ulama terpercaya rakyat yang menetapkan keputusan melalui jalan musyawarah yang ditetapkan melalui tiap-tiap peraturan sipil, politik dan peradilan.²³

Yang menjadi syarat wajib untuk menjadi seorang *Ahlul Hilli Wal Aqdi* diantaranya :

1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan itu dapat menentukan siapa yang dapat memegang kekuasaan menjadi seorang pemimpin.
3. Didalam anggotanya harus terdapat ahli manajemen dan pakar yang dapat menentukan siapa yang dapat memegang kekuasaan menjadi seorang pemimpin.

Al-Mawardi juga menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh anggota *Ahlul Hilli Wal Aqdi* yakni : Adil, memiliki ilmu yang bertalian

²³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 83

dengan aspek-aspek kepemimpinan, dan memiliki kemampuan verifikasi calon-calon pemimpin.²⁴

Syarat yang paling utama dan sangat diperhatikan dalam setiap kekuasaan seperti yang disampaikan para fuqaha adalah syarat adil, seperti halnya Ar-Ridha mengartikan sifat adil dalam *Al-Mabsuth*-nya :

*“Adil adalah istiqamah (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain: Bahwa seorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Kesalahannya lebih banyak dari kerusakannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya.”*²⁵

Lalu dalam hal pencalonan legislatif yang berkenaan dengan syarat adil tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang modern, bahwa jika tidak ada syarat tersebut pada orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif maka akan hilang keanggotan itu. Contohnya pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1972 M tentang *Majlis Asy-Sya 'b* (Penyempurnaan undang-undang Republik Arab Mesir Tahun 1972) yang telah memasukkan sifat adil kedalam syarat dalam materi ke-5 tentang orang yang akan dipilih sebagai anggota *Majlis Asy-Sya 'b*.

Memahami sifat adil dalam hal ini berarti untuk para pemegang kekuasaan yang dalam hal ini anggota legislatif itu sendiri yang mana akan berperan sebagai wakil rakyat yang akan melaksanakan tugas-tugas umum haruslah mempunyai nama baik dan jauh dari kecurigaan, apabila ada keterangan resmi dari lembaga tertentu dalam suatu negara dan indikasi-

²⁴ Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasah, Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*, h. 43

²⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h.113

indikasi bersifat materi dan menjadi penguat hilangnya syarat adil pada mereka. Karena bagaimana kita akan berpegang pada dewan yang mengeluarkan peraturan atau keputusan sementara ia tidak memiliki sifat adil itu sendiri.²⁶

Persyaratan sifat adil dalam tingkah laku adalah sebuah kemaslahatan untuk tercapainya kecermatan agar tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya, seperti halnya dalam kewenangan dalam kepemimpinan, peradilan dan tugas-tugas yang didalamnya terdapat pengambilan keputusan, jika diserahkan kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya maka ia akan memutuskannya dengan zalim dan kemaslahatan itupun akan hilang dan kerusakan parah yang akan muncul.

Perkara mengenai *Ahlul Hilli Wal Aqdi* ini juga diwarnai dengan banyaknya “*pemain sandiwara*” baik dari segi pencalonan sampai pada tingkat pemilihan sekalipun. Terbukti dewasa ini seperti adanya keputusan-keputusan Mahkamah Agung dengan tidak sahnya pemilihan beberapa golongan yang di masa sekarang disebut “Dewan Parleментар” atau tidak sahnya undang-undang pemilihan itu sendiri. Masalah seperti itu bermunculan karena adanya ketidak netralan dalam proses itu sendiri baik adanya campur tangan pemerintah, intervensi aparat yang mempengaruhi proses pencalonan sampai pemilihan yang harusnya bersih, bebas dan

²⁶ *Ibid*, h. 116

netral. Yang diakibatkan karena tidak adanya pengawasan yuridis, bahkan menggunakan cara-cara kotor untuk mengotori kebersihan pemilihan.²⁷

Ketidak bersihan dan ketidak netralan pada proses itu diwarnai banyaknya orang yang ingin menduduki jabatan itu dengan menghalalkan segala cara dengan kemunafikan yang dibawanya, sebagaimana hadis menjelaskan :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُمِّنَ خَانَ
(روا لشيخان عن أبي هريرة)

“Tanda orang munafik itu ada tiga yaitu, apabila berbicara dusta, berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat.” (Riwayat Syaikhain melalui Abu Hurairah r.a)

Penjelasan : tiga ciri orang munafik, yaitu apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Apabila pada seseorang terdapat salah satu dari sifat-sifat tersebut, berarti ia termasuk orang munafik. Pengertian munafik ialah menempatkan sesuatu yang berlainan dengan isi hati.²⁸

Dan hadis selanjutnya :

حديث عبد الله بن عمرو و أن النبی قل : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا , وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ جُصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ جُصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أَوْ تُمِّنَ خَانَ . وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ , وَإِذَا خَاصَمَ فَخَرَ

²⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, h. 91

²⁸ Sayyid Ahmad Al-Masyimi, *Syarah Mukhyaarul Ahaadiits, Hadis-hadis pilihan berikut penjelasannya*, (Bandung: Sinar Baru, 1993) h. 5

Abdullah bin Amr. R.a bersabda: Empat sifat siapa yang melakukannya menjadi munafiq seratus persen, dan siapa yang melakukan sebagian, berarti ada padanya sebagian dari nifaq hingga meninggalkannya, yaitu: 1. Jika diamanati (dipercaya ia khianat, 2. Jika berkata-kata dusta, 3. Jika berjanji menyalahi, 4. Jika bertengkar curang. (Al Bukhari, Kitab Iman, Bab tanda-tanda orang munafik, no. 33 dan Muslim, Kitab Iman, Bab penjelasan sifat-sifat orang munafik, no. 59)²⁹

Dua hadis diatas menunjukkan sifat-sifat kemunafikan orang-orang yang sangat berbahaya apabila menduduki jabatan *Ahlul hilli wal aqdi* sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengemban amanat demi kesejahteraan rakyat. Dan apabila ada padanya sifat-sifat tersebut maka teranglah hilangnya sifat adil yang dimaksud dalam keanggotaan *Ahlul hilli wal aqdi*.

Maka peran peradilan dalam memutus setiap perkara mengenai pelanggaran yang terjadi di pemilihan umum yang berkenaan dengan pencalonan legislatif ini sangatlah penting adanya. Karena atas dasar putusan-putusan yang dikeluarkan nantinya diharapkan dapat membawa neraca keadilan bagi semua pihak.

Pengadilan Dalam Islam

Didalam Islam dikenal Mahkamah Madhalim dan ketuanya dikatakan Waliyul Muhalim, yang bertugas menghukum pejabat-pejabat tinggi. Umar sendiri menghukumi penguasa yang bertindak salah dan menerima pengaduan langsung dari rakyat jelata.

Ali mengadakan Majelis Madhalim. Abdul Malik juga mengadakan Majelis Madhalim. Mahkamah-mahkamah Madhalim dipimpin sendiri

²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan (Terjemah)*, (Surabaya: P. Bina Ilmu) h. 21

oleh kepala negara, atau gubernur atau orang yang khusus ditunjuk untuk menjadi kepala bagu mahkamah ini.

Dan ketua-ketua mahkamah ini menurut uraian Al-Ahkam shultaniyah karangan Al-Mawardi dibantu oleh 5 unsur :³⁰

1. *Punggawa-punggawa* dan pegawai-pegawai mahkamah.
2. Anggota-anggota hakim
3. Para ahli fiqh (ahli hukum)
4. Pencatat perkara (Panitera)
5. Tenaga-tenaga yang dapat dipakai apabila diperlukan.

Menurut sistem lama, orang-orang yang dapat menjadi saksi sudah disediakan oleh hakim di Mahkamah. Apabila perlu maka ia diangkat menjadi saksi. Juga Mahkamah Madhalim memeriksa perkara-perkara yang diadu oleh rakyat terhadap penguasa.

Pokok-pokok hukum peradilan, acara (*code of procedure*) dan hubungan antar bangsa.

1. Beberapa prinsip umum:

Fiqh Islam mensyariatkan supaya hakim hendaklah seorang yang dapat dipercaya, baik tentang mazahahnya, matang akalnya, tentang keshalihannya, tentang faham dan ilmunya dalam bidang sunah dan atsar, mengetahui masalah-masalah fiqhiyah, mampu memutus perkara yang diajukan kepadanya, mempunyai kewibawaan, bijak dan penyabar, taqwa kepada Allah, tetap berpegang kepada kebenaran dan keadilan.

³⁰ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam, Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta : Bulan Bintang :1975), h. 75

- a. Hakim tidak boleh anak kecil, tidak boleh orang ma'tuh (orang yang selalu bingung), tidak boleh pula orang buta dan orang tuli.

Diantara adab-adab hakim, ialah : dia tidak menghendaki supaya dia diangkat menjadi hakim, dan tidak memutuskan perkara tanpa dihadiri orang lain, tidak memberi salam dan tidak diberi salam dalam sidang pengadilan.

- b. Hakim tidak boleh mendahulukan orang yang datang belakangan, tidak berbisik-bisik dengan salah satu pihak dan hendaklah dia menerangkan kepada yang dikalahkan, alasan-alasan yang dipergunakan, yang disebut : "*Al Asbab wal Haitssyyat*".

- c. Hakim wajib menolak hadiah. Jika ia tak tahu lagi siapa yang memberi hadiah kepada nya, atau tidak dapat dikembalikan lagi hadiah itu kepada yang meghadiahkannya, hendaklah hadiah itu diserahkan ke Baitul Mal.

- d. Hakim harus mengganti kerugian pihak yang dirugikan apabila nyata-nyata hakim bersalah.

Pengadilan harus memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan As-sunnah. Apabila tak ada nash dan belum ada ijma' sahabat terhadap hukum itu, haruslah hakim melakukan qiyas kepada hukum-hukum yang dapat di qiyaskan hukumnya itu kepadanya. Dengan demikian hakim mempunyai *shultah tasyri'iyah* dengan jalan ini. Hal ini yaitu hakim mempunyai *shultah tasyri'iyah* telah berjalan hingga sampai kepada masa dibukukan mahzab dan Ushul fiqh hakim diharuskan memutuskan

perkara sesuai dengan pendapat *Ashabul Madzahib* karena penguasa memerintahkan hakim berbuat demikian, yang karena itu terlepaslah sedikit demi sedikit *shultah tasyri'iyah* dari tangan hakim. Kemudian setelah berlaku sesuatu masa pula hakimpun diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan pendapat salah satu mahzab. Maka hakimpun menjadi *muqallid* tidak lagi *mujtahid*.³¹

Umar Ibn Abdul Aziz berkata:

“Hakim menjadi sempurna, apabila terdapat padanya sifat :

1. Mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya.
2. Bersih dari sifat tamak
3. Lemah lembut menghadapi sengketa
4. Menempuh jalan yang dilalui para imam dan
5. Bermusyawarah dengan ahli ilmu dan ra'yi.

Hadis yang berkenaan dengan hakim dan keadilan :

- a. Kategori hakim dalam memutus perkara :

عَنْ بَرِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
 "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ "رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ
 فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحَكَمِ فَهُوَ فِي
 النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفْ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" رواه
 الارعة وصححه الحاكم

“Dari Buraidah r.a., bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Hakim itu ada tiga, dua orang dineraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenarannya, namun ia tidak memutuskannya dengannya,

³¹ *Ibid*, h. 116

maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenarannya dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.”
(HR Al-‘Arba’ah Hadis shahih menurut Hakim)

Takhrij Hadis : Diriwayatkan oleh Abu Daud (3573), Ibn Majah (2315), dan al-Nasa’i dalam al-kubra (3/461-462). Para perawinya terpercaya, kecuali Khalid bin Khalifah al-Asy’ari. Hadis ini shahih menurut al-Hakim (4/101). Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi (1322), sedangkan pada sanadnya ada Syarik al-Qadhi yang dikenal buruk hafalannya.

Kesimpulan Hadis : Hakim ada tiga macam, dua masuk neraka dan satu masuk surga :

- 1) Hakim yang mengerti perkara itu benar, lalu ia memutus berdasarkan kebenarannya maka ia masuk surga.
- 2) Hakim yang tahu kebenarannya namun ia tidak memutus perkara dengan kebenarannya, maka ia masuk neraka.
- 3) Hakim yang tidak mengerti perkara itu benar, lalu ia memutus itu berdasarkan dengan kebodohnya atau ketidaktahuannya, maka ia masuk neraka.

b. Hakim harus mendengarkan kedua masing-masing pihak yang berperkara :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
"إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ
تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي" قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ" رواه أحمد
وأبو داود والترمذي وحسنة ابن المديني وصححه ابن حبان

“Dari Ali r.a dia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Ali berkata : Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.)

Takhrij Hadis : diriwayatkan oleh Ab Dawud (3582), Tirmidzi (1331), dan Ahmad (1/90, 96, 111). Ada Simak Ibn Harb yang diperdebatkan pada sanadnya. Hadis ini hasan menurut Tirmidzi dan al-Bani dalam al-irwa’ (8/226-227) menyebut pada sanadnya ada Hansya Ibn al-Mu’tamar, Ibn Abdul Hadi dan Ibn al-Madani dalam al-muharrar (2/641), sanadnya baik, dan shahih menurut Ibnu Hibban.

Kesimpulan Hadis : Hakim untuk mencari keterangan yang benar harus mendengarkan para pihak yang berperkara, sehingga keterangan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

c. Hakim memutus perkara berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَجِيهِ شَيْئًا" زاد في رواية "فلا يأخذه" رواه ابن كثير في الإرشاد "فإنما أقطع له قطعة من النار"

متفق عليه

“Dari Ummu Salama r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Sesungguhnya engkau sekalian selalu mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya, lalu aku memutus untuknya seperti yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku berikan kepadanya sesuatu

yang menjadi hak saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya.” (HR Bukhari-Muslim).

Takhrij Hadis : Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari (7196) dan Muslim (3/1337).

Kesimpulan Hadis: Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan, disebabkan salah satu yang berperkara pandai mengajukan argumentasi sehingga ia dapat mengalahkan pihak lain, maka itu adalah tanggung jawabnya sendiri diakhirat nanti.³²

Kekuasaan pengadilan dibagi, pada masa dahulu antara *qadli*, *muhtasib* dan *qadli madhalim*. Tugas *qadli* lebih lengkap dari *qadli muhtasib* dan *qadli madhalim*. Tugas *muhtasib* hanyalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang mengganggu langsung kepentingan umum atau peristiwa-peristiwa yang memerlukan segera diputuskan, apabila bukti-bukti telah cukup, tidak memerlukan pemeriksaan yang mendalam lagi.

Sedangkan hakim (*qadli*) memeriksa perkara dan mengadakan penelitian yang mendalam dalam waktu yang panjang. Dengan keterangan ini jelaslah perbedaan antara perkara perkara yang diserahkan kepada hakim (*qadli*).

Wadhifah (tugas) *qadli madhalim*, ialah memutuskan perkara berat yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim biasa atau hakim *muhtasib*. Tugas *muhtasib* ialah mengawasi berlaku tidaknya hukum *syar'iyah*,

³² Madani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 384

memeriksa keadaan barang-barang dipasar, keadaan timbangan dan sebagainya.

Wilayatul Madhalim adalah pengadilan yang paling tinggi dalam sejarah islam. Dalam waktu sekarang ini dapat kita namakan Mahkamah Agung. Maksud pokok dari mengadakan *Wilayah Madhalim* ini (pengadilan tinggi ini) ialah menghukumi penguasa yang berkedudukan tinggi.

Pengadilan ini pada masa dahulu dipimpin oleh *khalifah* sendiri, atau gubernur yang ditunjuk untuk itu, atau oleh seorang yang mewakili mereka, atau diangkat seseorang yang dinamakan *Wali Madhalim*.

Hukum-hukum acara masuk kedalam *Siyasah Syar'iyah* yang dapat berkembang, bukan hukum yang tetap membeku, mengenai hal ini Ibnu Aqiel berkata : “ *siyasah* ialah tiap-tiap perbuatan yang dengan perbuatan itu manusia lebih mendekati kemaslahatan dan lebih menjauhi kemafsadahan, meskipun perbuatan itu tidak disyari'atkan Rasul, ataupun tidak turunnya wahyu karenanya. Dan jika engkau kehendaki dengan perbedaan engkau, tidak ada *Siyasah* terkecuali sesuatu yang sesuai dengan *Syara'*, dengan arti “ yang tidak menyalahi apa yang dinashkan *syara'*: maka perkataan itu benar. Tetapi jika engkau kehendaki apa yang dinashkan *syara'* sendiri-sendiri, maka itu salah dan menyalahkan.

Ibnu Qayyim mengomentari perkataan Ibnu Aqiel :

“*Sesungguhnya Allah telah mengutus beberapa orang Rasul dan telah menurunkan beberapa kitab agar manusia dapat menegakkan neraca*

keadilan. Dia itu lah keadilan yang dengan keadilan itu tegak petala langit dan bumi. Maka apabila nampak tanda-tanda darinya dengan pembuktian apapun juga, maka itulah dia yang telah disyari'atkan Allah, agama-Nya, Keridhlaan-Nya dan perintah-Nya. Dan Allah tidak mengkhususkan pembuktian keadilan dan petunjuk-petunjuknya serta tanda-tandanya dalam satu bentuk dan tidak pula membatalkan pembuktian-pembuktin yang lain yang lebih kokoh dari padanya dan lebih jelas petunjuknya serta lebih terang, tetapi Tuhan menjelaskan dengan petunjuk-petunjuk yang telah disyari'atkan bahwa maksud-Nya, ialah menegakkan haq dan keadilan dan supaya manusia menegakkan keadilan itu.”³³

Hakim *Madhalim* menyelesaikan perkara yang diajukan masyarakat terhadap penguasa, terhadap pengutip-pengutip *kharaj*, dan petugas-petugas pemerintah. Dengan demikian, manjadikan *Mahkamah Madhalim* suatu mahkamah administratif yang memutuskan perkara terhadap para penguasa.

Mahkamah Madhalim menurut sejarah peradilan, itulah yang bertugas menerima apel, George Zaidan berkata “*Mahkamah Madhalim* adalah serupa dengan majelis istinaf (pengadilan tinggi). Tujuannya menerima pengaduan rakyat terhadap para penguasa ataupun pihak lain. *Mahkamah Madhalim* luas gelanggangnya dari majelis isti'naf.

Al Mawardi telah menerangkan tugas-tugas yang membedakan antara hakim biasa dan hakim *madhalim*. Dengan kitab-kitab itu dapatlah

³³ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam, Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, h. 117

diketahui bahwa pendapat yang mengatakan bahwa fiqh Islam tidak mempunyai prinsip mengubah hukum yang telah ditetapkan itu, perlu ditinjau lebih jauh. Perkataan Umar :

“janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan pada hari itu, kemudia engkau tinjau kembali putusan itu.”

Dapat menjadi dasar para hakim yang memutuskan perkara yang berbeda dari pada apa yang pernah diputuskan.

Landasan yang kuat yang menjadi dasar pentingnya lembaga peradilan (*Al-Qada'*) dan pentingnya memutus perkara dengan seadil-adilnya tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بِمَا أُنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهِمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang Diturunkah Allah, Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebgai apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (Dari hukum yang telah Diturunkan Allah), maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak Menimpakan musibah kepada mereka yang disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 92

4. Konsep Siyasah Dusturiyah Mengenai Hak Politik dalam Pencalonan Legislatif

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu pembedaan dalam Fiqh Siyasah yang telah disebutkan, didalamnya mencakup *Siyasah Tasyri'iyah* (Siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (Siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat) dan *Siyasah Tanfiedziah Syar'iyah* (Siyasah pelaksanaan syariat). Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan Siyasah yang berhubungan dengan peratiran dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁵

Pembicaraan mengenai hak-hak yang wajib bagi individu itu sendiri selalu menjadi topik pembicaraan yang panjang, khususnya dalam dunia politik yang dalam hal ini pencalonan dan pemilihan *ahlul hilli wal aqdi* yang dewasa ini dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu tersandung dengan masalah pelanggaran hak politik. Dalam Islam perlindungan terhadap hak-hak manusia sangatlah dijunjung tinggi karena dipandang sebagai pencegah terhadap tindakan kezhaliman, yang terbagi dalam perlindungan dalam hal berikut:

1. Perlindungan atas agama

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), h. 8

2. Perlindungan atas jiwa
3. Perlindungan atas akal
4. Perlindungan atas keturunan
5. Perlindungan atas kehormatan
6. Perlindungan atas rasa aman, dan
7. Perlindungan atas batas negara³⁶

Yang kesemuanya menjadi dasar atas perlindungan terhadap hak-hak asasi dasar manusia yang termasuk didalamnya hak politik tersebut. Namun dengan catatan semua itu diimbangi dengan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan, karena Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan yakni setara antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban agar terciptanya keadilan bagi semua pihak tanpa dirugikan.

B. Hak Politik dan Pencalonan Legislatif Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Hak Politik dalam Hukum Positif

Sebelum menjelaskan pengertian hak politik, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian kata hak dan politik. Kata hak memiliki pengertian benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang untuk menuntut sesuatu, dan hak juga dapat diartikan sebagai martabat atau derajat.³⁷ Dan kata Politik itu sendiri yang berarti ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, atau

³⁶ Dewi Fortuna DM, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif" (Skripsi, Fakultas Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2017) h. 49

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 292

seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.³⁸ Pada umumnya politik dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga negara untuk membangun kehidupan bernegara yang harmonis.

Hak politik merupakan kumpulan hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kepastiannya sebagai anggota organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri untuk memegang jabatan umum dalam suatu pemerintahan dimana para warga negaranya dapat ambil andil melalui hak tersebut untuk mengatur tiap-tiap masalah yang ada dalam pemerintahan di negaranya.³⁹ Secara garis besar hak politik merupakan kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat untuk menentukan pilihan dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara.

Manusia selalu disebut sebagai makhluk politis. Karena sebagai individu tak akan pernah bisa hidup hanya dengan kemampuan pribadinya saja, tapi membutuhkan lembaga-lembaga sosial dan butuh akan masyarakat dan negara dimana terdapat sistem nilai dan ideologi yang menjadi pedoman untuk tujuan hidupnya sebagai warga negara dalam suatu negara. sebagai makhluk politis yang bermasyarakat dan bernegara, dimana ia sebagai pelaku kehidupan masyarakat dan negaranya ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara di negaranya itu.⁴⁰

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007) h. 119

³⁹ Mujaer Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2005) h. 30

⁴⁰ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) h. 7

Perjuangan suci yang paling hebat dan paling banyak memakan korban selama sejarah manusia, ialah mempertahankan hak-hak manusia, termasuk juga hak politik ini, sejarah demokrasi dari zaman kezaman, pada hakekatnya adalah sejarah perjuangan hak-hak manusia. Ia menghilangkan segala tembok-tembok pemisahan diantara segolongan manusia dengan golongan lainnya.

Baik didalam *Declaration of Independence* (pernyataan kemerdekaan) dari Amerika Serikat (4 juli 1776), maupun *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) dari Perancis pada 1778, lain tidak adalah pernyataan atas hak-hak manusia.

Declaration of Independence menyatakan dalam pembukaannya, “bahwa sekalian manusia dititahkan sama”, bahwa mereka dikaruniai oleh Tuhan yang menitahkannya dengan beberapa hak yang tak dapat dipisahkan daripadanya”, bahwa diantaranya ialah jiwa, kemerdekaan dan mencari kebahagiaan.”

Declaration des Droits de l'homme et du citoyen menyebutkan : Pasal 1, “Manusia lahir merdeka dan sama dalam hak-haknya. Perbedaan-perbedaan kemasyarakatan hanyalah dapat didasarkan atas kepentingan umum. Pasal 2, “ Tujuan-tujuan tiap-tiap ikatan politik ialah untuk memelihara hak-hak kodrat yang tidak dapat lenyap dari manusia. Hak-hak itu ialah kemerdekaan, milik, keamanan dan hak melawan penindasan.

Didalam *Atlantic Charter* yang mempelopori lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa, ditegaskan dengan benar-benar bahwa manusia merupakan subjek yang menentukan. Jorge Americano didalam “*The New Foundation Inernational law*” menerangkan sebagai berikut : “Atlantic Charter mengemukakan subjek baru didalam hukum, yang sebelumnya belum pernah diperhatikan, yaitu manusia. Sehingga subjek pertama dalam hukum internasional ialah manusia, dan baru dibelakangnya menyusul “bangsa” yang menyusun dirinya didalam suatu negara berdasarkan penghormatan atas derajat manusia, yakni berdasarkan asas-asas demokrasi.

Kemudian sampailah kita kepada puncak pengakuan hak-hak manusia itu. Ialah “*Universal Declaration of Human Rights*” (Pernyataan Umum Hak-hak Manusia) yang telah disahkan dalam rapat umum P.B.B pada 10 Desember 1948, terdiri dari 30 pasal. Kita kutip Pasal 21, yang khusus mengenai hak-hak politik bagi manusia.

Pasal 21:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam urusan-urusan pemerintahan negerinya, langsung atau diperantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang berhak untuk masuk (diangkat) atas dasar sama dengan jabatan-jabatan pemerintahan dinegerinya.
3. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur, yang

dilakukan dalam pemilihan yang umum dan berkesamaan serta pemungutan suara yang rahasia atau dengan tatacara pungutan suara bebas yang sederajat dengan itu.

Demikianlah hak politik sebagai satu bahagian dari hak-hak asasi manusia diakui secara resmi oleh suatu badan internasional, yang meliputi hampir seluruh negara didunia. Sengaja kami mengambil pernyataan yang resmi saja untuk menghindarkan dari catatan sejarah mengenai perjuangan tentang kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia yang sangat luas dan lebar panjang itu.

Bahwa hak politik itu meliputi segala urusan kenegaraan, diterangkan oleh Adi Nograho dalam “Ensiklopedi” nya sebagai berikut:

“Jadi Politik itu meliputi segala urusan negara. mulai dari anggota dan yang terkecil didesa-desa hingga ke anggota dewan negara yang terbesar, mereka berpolitik. Dan tiap-tiap warga negaranya yang memilih wakil-wakil rakyat untuk dewan itu juga berpolitik, demikian juga tiap-tiap anggota partai politik, oleh sebab partainya menuju salah satu cita-cita politik, juga mereka berpolitik.”⁴¹

2. Macam-Macam Hak Politik Warga Negara

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan,

⁴¹ H. A, H.Z.A, Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h.130

berkumpul dan menyatakan pendapat; dan Pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik. Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok:

1. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat.

Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.

2. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.

Kelompok hak-hak sipil dapat dirumuskan menjadi :⁴²

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.88

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
- d. Setiap orang bebas dalam memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
- e. Setiap orang berhak bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum.
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.
- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
- k. Setiap orang berhak bertempat tinggal diwilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali kenegaraanya.
- l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang diskriminatif itu.

Ungkapan Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim yang menyatakan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan hak-hak asasi mereka. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”⁴³

⁴³ Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, “*Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*”(On-Line), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (17 september 2019)

Tetapi dari semua penjelasan mengenai hak politik diatas yang berkenaan langsung dengan penegakan Hak Asasi Manusia akankah selalu diimbangi dengan kewajiban yang mengirinya.⁴⁴

“Baik didalam akar nilai budaya bangsa yang kemudian dituangkan di dalam dasar dan konstitusi negara Indonesia maupun didalam deklarasi-deklarasi internasional ditegaskan bahwa hak dan kebebasan harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab. Tetapi, di Indonesia tuntutan keseimbangan ini menjadi masalah.

Pada masa lalu, hak-hak rakyat ditekan habis-habisan dan rakyat lebih banyak dibebani kewajiban (terhadap kepentingan penguasa). Tetapi, setelah reformasi ada kecenderungan kuat bahwa banyak orang yang hanya , menuntut hak, tapi mengabaikan kewajibannya. Demi kelangsungan hidup bernegara yang tertib dan bermartabat, diperlukan gerakan besar-besaran untuk membangunkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta kebebasan dan tanggung jawab asasi manusia di Indonesia. (Mahfud Md: 2011)”

Indonesia menerapkan prinsip negara hukum, tentunya terikat dengan perlindungan Hak-hak asasi manusia, karena setiap negara yang menerapkan konsep negara hukum ini tentulah memiliki kesamaan dalam perlindungannya terhadap HAM.

Dimasa lalu, pelanggaran HAM oleh aparat banyak terjadi, seperti banyak penangkapan tanpa surat perintah, pemunculan kambing hitam dalam suatu tindak pidana dan masih banyak lagi. Adanya arus pembelokan terhadap penegakan HAM sejak era reformasi, dari yang semula penuh dengan pelanggaran dan sangat represif oleh aparat negara menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM yang bahkan dalam batas tertentu, cenderung mendesak dan mengalahkan aparat negara.

⁴⁴ Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 175

ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dan perubahan konstitusi yang lebih mengutamakan dan memberikan tempat pada konvensi-konvensi penegakan HAM dengan penanganan yang lebih kuat terhadap kasus-kasus HAM yang ditangani secara hukum. Banyak dilakukannya penyempurnaan terhadap produk-produk hukum perlindungan HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM yang diproses secara hukum mulai dilakukan secara lebih terbuka dan media masa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat leluasa melakukan pengawasan.

Tetapi dari pembelokan arus tersebut yang dapat disebut sebagai kemajuan terdapat hal yang tidak dapat dihindari yakni kesan perjuangan perlindungan terhadap HAM tidak diimbangi dengan upaya menjalankan dan memenuhi kewajiban yang ada. Banyak orang yang berani berargumen dan mengkritik untuk memperjuangkan HAM, namun tidak secara jujur mengakui kewajiban asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara yang belum dilaksanakan.

Terdapat orang yang tidak mau menghormati keputusan pengadilan yang telah memberikan hak kepada seseorang karena merasa kuat karena memiliki uang ataupun *beking* dan tetap bergeming tidak mau melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Orang-orang seperti ini melakukan perlawanan terhadap setiap keputusan hukum dengan tema perlawanan mereka adalah atas nama perlindungan HAM. Mereka mengklaim atas kebenaran dan hak tanpa mau melihat hak orang

lain, padahal hak asasi seseorang menjadi kewajiban pula untuk dihormati, maka disinilah perlunya hukum untuk memunculkan keadilan tentang pertentangan hak dan kewajiban tersebut dan adanya kehormatan terhadap hukum.

Hal-hal mencari kemenangan sendiri dengan berlindung pada konsep negara hukum ini tentulah bertentangan dengan konsep perlindungan HAM yang mana mengandung kewajiban asasi juga. Para pihak yang saling berlawanan ini selalu mengklaim tindakannya berdasarkan hak yang diberikan oleh hukum di negara hukum saat memperjuangkan HAM, namun saat melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar kewajiban dasarnya mereka juga menyebutkan hal yang demikian juga. Maka dari itu penting untuk melihat kembali keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan memperhatikan bagaimana konsep negara hukum yang mengatur hal tersebut. Konsep negara hukum itu sendiri adalah :

1. Perlindungan konstitusional, yakni, selain menjamin hak-hak individu konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, h. 181

3. Lembaga-lembaga penyelesaian Sengketa dalam Pencalonan Legislatif :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu, setelah lebih dulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur,bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.

- g. Menetapkan peserta pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPRD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- i. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD;
- l. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;

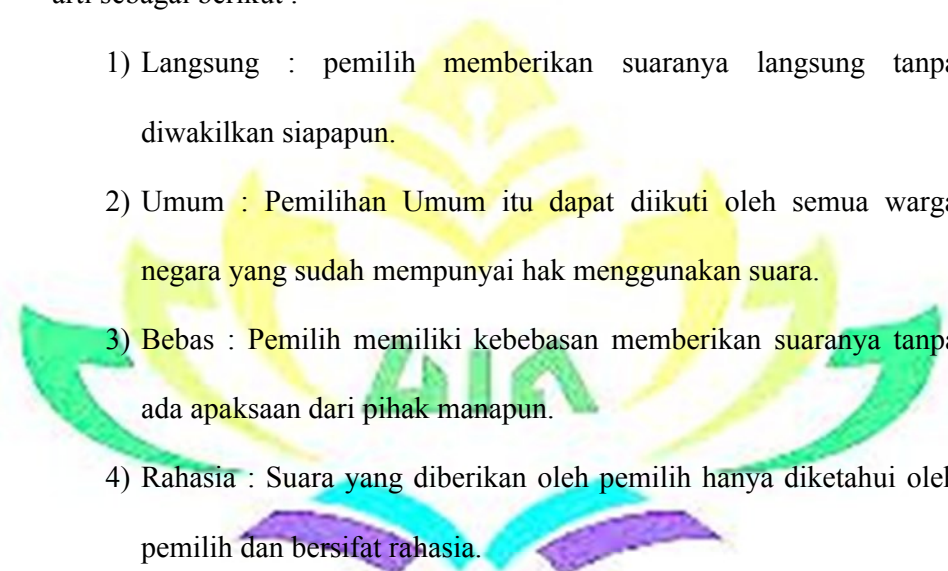
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretariat Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Terwujudnya dan terlaksannya istilah pemilu demokratis muncul dengan ditandai adanya integritas proses penyelenggaraan Pemilu dan hasil Pemilu. Integritas proses penyelenggaraan Pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan-tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti : Undang-undang pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum didalamnya, dimana tidak ada kekosongan hukum atau

⁴⁶ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta : Erlangga, 2015), h.

kontradiksi ketentuan dalam satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta tidak mengandung multitafsir.

Semua ketentuan baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil. (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang kesemuanya memiliki arti sebagai berikut :

- 
- 1) Langsung : pemilih memberikan suaranya langsung tanpa diwakilkan siapapun.
 - 2) Umum : Pemilihan Umum itu dapat diikuti oleh semua warga negara yang sudah mempunyai hak menggunakan suara.
 - 3) Bebas : Pemilih memiliki kebebasan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 - 4) Rahasia : Suara yang diberikan oleh pemilih hanya diketahui oleh pemilih dan bersifat rahasia.
 - 5) Jujur : Bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama yang akan terpilih.
 - 6) Adil : memastikan perlakuan yang sama terhadap setiap peserta Pemilu maupun pemilih tanpa membedakan, asas jujur dan adil mengikat tidak kesemua pihak baik pemilih, peserta maupun penyelenggara Pemilu.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan institusi yang tercipta dari gerakan reformasi, dengan bereksistensi sebagai lembaga yang mengemban tugas menjaga semangat reformasi dan menegakkan demokrasi.

Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengamanatkan pembentukan lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi yang disebut dengan Bawaslu Provinsi dan pada bagian kesekretariatan Bawaslu RI diperkuat dengan unit kesekretariatan esalon I yang dinamakan Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu. Dalam hal ini kewenangan Bawaslu ditambah selain mencakup semua kewenangan yang sebagaimana diatur UU Nomor 22 Tahun 2007 diberi pula kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.⁴⁷

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, selain sebagai pengawas Pemilu juga melakukan Pengawasan terhadap pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas merupakan eksistensi dari adanya Bawaslu.

⁴⁷ *Ibid*, h. 191

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas adanya potensi kecurangan serta melaporkannya kepada pihak Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.⁴⁸ Melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu merupakan salah satu fungsi dari adanya Bawaslu. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan pemilu.⁴⁹

Kewenangan dan Tugas Bawaslu :

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu disetiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.
3. Tugas Bawaslu yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

⁴⁸ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*, (2017), h. 4

⁴⁹ Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>. Di unduh Rabu 13 Maret 2019.

a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:

- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
- 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- 3) Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
- 5) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2) Penetapan peserta pemilu;
- 3) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelaksanaan kampanye;
- 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;

- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - 7) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/kota;
 - 9) Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 - 11) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pemilu;
 - 12) Pelaksanaan putusan DKPP, dan
 - 13) Proses penetapan hasil pemilu
- c. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu;
- f. Evaluasi pengawasan pemilu
- g. Menyusun laporan hasil pengawasan pelanggaran pemilu;

h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

i. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:

- 1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan 3
- 2) Peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- 3) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- 4) Menyelesaikan sengketa pemilu;
- 5) Membentuk Bawaslu Provinsi;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- 7) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilu.

Bawaslu berkewajiban sebagai berikut.

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR RI, dan KPU sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Dalam hal pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu itu sendiri terpisah dari Komisi Pemilihan Umum dan Mandiri. Anggapan mengenai Pengawas Pemilu itu sebagai bagian dari KPU dan bawahan KPU itu tidaklah benar, KPU menyatakan dalam putusannya bahwa panitis pengawas Pemilu dari pusat hingga kecamatan merupakan lembaga yang berada diluar struktur organisasi KPU (pasal 3 Keputusan KPU No. 88 Tahun 2003) yang menegaskan didalam tugas dan wewenangnya Pengawas Pemilu bertindak secara mandiri.

Walaupun terpisah tetap saja antara pelaksana Pemilu dengan pengawas Pemilu ada hubungan koordinasi guna mensukseskan

⁵⁰ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, h. 14

pelaksanaan Pemilu, berupa pertemuan berkala antara KPU dan Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.⁵¹

Tugas dan wewenang Bawaslu yang telah disebutkan diatas bertujuan untuk menjadi pengawas dan memberikan kepastian bahwa tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilu yang disusun KPU itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yaitu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Namun dalam praktik dilapangan tak dapat dipungkiri bahwa banyak ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang memerlukan tindak lanjut dan perlu ditela'ah lebih dalam.

Buku keempat dan buku kelima Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pelanggaran Pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana Pemilu. Meski banyak sekali bentuk potensi sengketa atau pelanggaran yang dapat terjadi dalam Pemilu, tetapi secara garis besar dapat terbagi kedalam 4 kategori :

- a. Pelanggaran Administratif Pemilu
- b. Pelanggaran Pidana Pemilu
- c. Perselisihan Hasil Pemilu
- d. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Pemilu itu sendiri berasal dari Temuan yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya serta pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau laporan WNI yang mempunyai hak

⁵¹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 86

pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu dan jajarannya pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Laporan disampaikan kepada Bawaslu atau jajarannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU RI, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Misalnya sengketa keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilu, sengketa antara Partai Politik dengan anggota atau pihak lain mengenai pendaftaran Caleg karena dianggap tidak sesuai aturan atau seizin yang bersangkutan.

Penanganan sengketa proses Pemilu di Bawaslu antara lain:

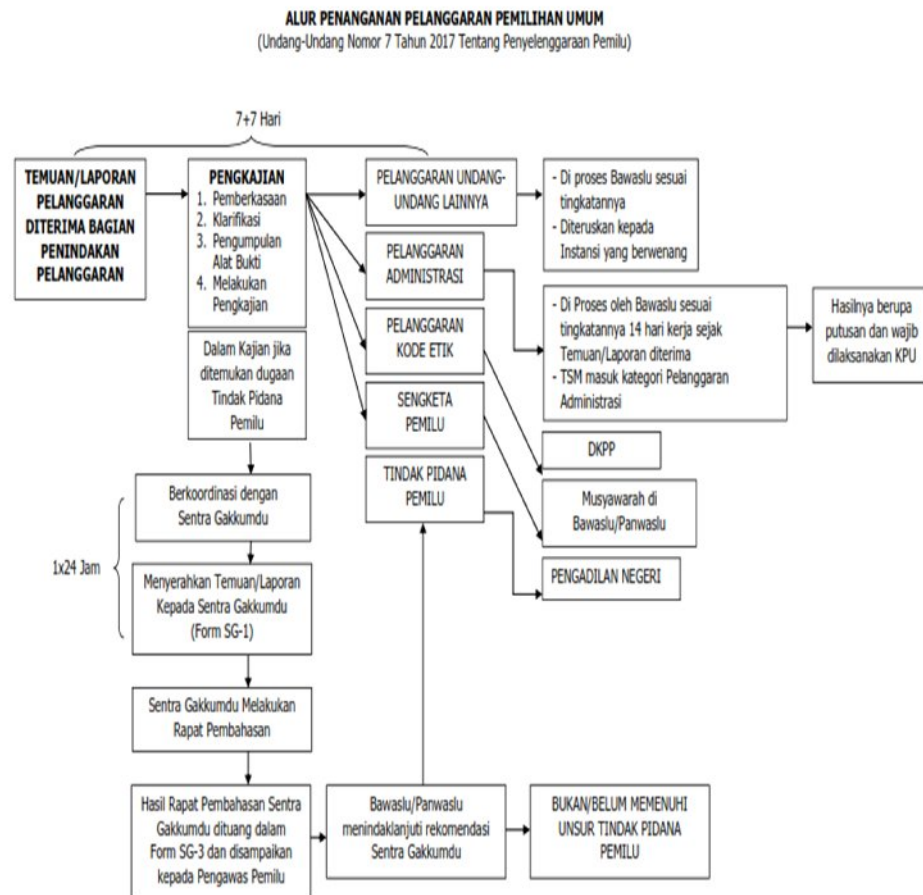
1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh calon peserta dan/atau peserta Pemilu kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten atau Kota yang menjadi sebab sengketa.

3. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mediasi atau musyawarah demi tercapainya kesepakatan.
4. Jika kesepakatan tidak tercapai diantara pihak yang bersengketa maka penyelesaian dialukan adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.
5. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
6. Pengambilan keputusan oleh Bawaslu wajib dilakukan secara terbuka.
7. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu mengenai (a) verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, (c) penetapan pasangan calon. Untuk putusan mengenai 3 (tiga) hal ini, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)⁵²

⁵² Rozali Umar, "Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Penyelesaiannya" Makalah disampaikan pada Seminar Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 oleh PERADI dan Bawaslu di Hotel Sheraton, Bandar Lampung (13 April 2019) h. 4

Tabel 1

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu



Dan dalam pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada pelanggaran administratif yang berkenaan dengan pencalonan legislatif yang hal tersebut telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang No 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya memuat persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :⁵³

Pasal 240

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat.
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur

⁵³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
- p. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Mengenai hal yang sama juga lebih dipertegas kembali dalam beberapa pasal di Peraturan KPU Nomor -20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota:

Pasal 2

1. Dalam menyelenggara Pemilu, penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan akseibilitas.

Pasal 7

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 L. mengundurkan diri sebagai : Aparatur Sipil Negara dan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Dalam Bab V bagian Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap :

Pasal 27 ayat (4) menyatakan :

“Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.”

Lalu dipertegas pada penjelasan ayat (8) bahwa :

“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

Pasal 29

1. Terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (8), Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti.
2. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.⁵⁴

Selanjutnya dalam buku Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab I Pelanggaran Pemilu, bagian kesatu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu :

Pasal 454

1. Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
2. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

⁵⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
6. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
7. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS paling

lama 7 (tujuh) hari sejak temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Selanjutnya pada bagian ketiga masih pada Undang-undang yang sama pada bagian Pelanggaran Administrasi Pemilu, Paragraf 1 :

Pasal 460

1. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Paragraf 2

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
6. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi pada tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 463

1. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
4. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU ditetapkan.
6. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
7. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kemabali calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.⁵⁵

⁵⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan Konstitusi negara Indonesia, kedudukan, fungsi dan kekuasaan Mahkamah Agung sangat kuat. UUD 1945 Bab IX menyatakan : Pasal 24 (1): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Pasal 25 : “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Dari Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa hanya Mahkamah Agunglah satu-satunya badan yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri (mandiri), yang berada disamping kekuasaan pemerintahan di bawah pimpinan presiden, serta kekuasaan pembuat undang-undang yang berada ditangan presiden dan DPR bersama-sama. Tak ada satupun ketentuan yang secara tegas di dalam UUD 1945 mengecualikan atau membatasi fungsi Mahkamah Agung untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 menyebutkan : “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka hanya terlihat bahwa kekuasaan kehakiman adalah identik dengan kekuasaan peradilan karena secara definif kekuasaan kehakiman disebut sebagai kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Namun jika kita cermati dari pasal-pasal berikut ini seperti Pasal 10 (4) Undang-undang 14 Tahun 1970 menyatakan : “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.” Hal ini tidak dapat diartikan kekuasaan peradilan. Lalu pada Pasal 25 menyatakan: “Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang sola-soal hukum kepada lembaga negara lainnya, apabila diminta”. Inipun tidak termasuk dalam kekuasaan peradilan. Demikian halnya dengan Pasal 26 (1) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dengan ketentuan-ketentuan itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan peradilan tetapi meliputi kekuasaan-kekuasaan lainnya.

Kekuasaan Peradilan

Kekuasaan Mahkamah Agung yang langsung berkaitan dengan peradilan adalah kekuasaan untuk melakukan kasasi terhadap putusan yang lebih rendah, baik yang ada dilingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (PTUN), maupun peradilan militer, serta kekuasaan untuk memeriksa dan memutus peninjauan kembali atas putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh pihak yang berhak.

Pada kekuasaan peradilan itu sendiri terdapat kekuasaan lain yang melekat pada tugas hakim sewaktu melaksanakan proses pemeriksaan dan akan memutus perkara yang ditanganinya, ketika hakim melakukan pemeriksaan perkara dan hakim menilai bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perkara itu, maka ia wajib menemukan hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara itu.

Karena hakim sering menghadapi kasus seperti itu maka berlakulah asas yang menyatakan hakim harus bebas dan mandiri dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan kekuasaan peradilannya. Karena itulah sering terjadi perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama atau banding dengan putusan hakim yang lainnya. Dan kepada pihak-pihak yang berperkara baik dalam kasus perdata maupun pidana, adanya perbedaan putusan tersebut baik demi keadilan atau kepastian hukum tentu akan mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan kasasi.

Pencapaian kepastian hukum itu sendiri terbagi dalam dua unsur utama, pertama, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Yang memiliki pengertian hukum haruslah tegas dan tidak boleh multitafsir. Sedangkan yang kedua, adalah kekuasaan, atau yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Yang berarti, kekuasaan itu dilarang secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif (berlaku surut) dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas yang kemudian diikuti sebuah striktur kekuasaan yang berdasar kepada *trias politica* agar dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang dimaksud.⁵⁶

Maka disinilah pentingnya peran Mahkamah Agung yang diharapkan dapat menyatukan atau menyamakan perbedaan-perbedaan yang terjadi menjadi putusan-putusan yang sama untuk perkara yang berbeda namun bermuatan materi sama yang kemudian menjadi putusan tetap (yurisprudensi) yang dapat dijadikan acuan oleh hakim-hakim yang lebih rendah dalam memutus perkara.⁵⁷

Isu-isu Seputar Mahkamah Agung

Dunia kekuasaan peradilan yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman banyak diterpa masalah, isu-isu semakin banyak menerpa. Yang terkadang sulit membedakan mana peristiwa dan mana isu. “Mafia peradilan” contohnya, kata mafia sendiri memiliki arti “kejahatan

⁵⁶ E. Fernando M. Manullang, “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*”, Cet-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h.154

⁵⁷ Hartono Mardjono, “*Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*”, Cet-1, (Bandung: Mizan, 1997) h. 288

yang diorganisasikan”, banyak merebak dimasyarakat meski tak mudah untuk dibuktikan.

Tetapi ketika banyak terungkapnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu seperti dibalik peradilan kasus restitusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya yang awalnya diungkap oleh pihak kejaksaan, kasus pemalsuan putusan Mahkamah Agung yang melibatkan oknum pegawai Mahkamah Agung, dan yang paling aktual kasus Ghandi Memorial School, yang keduanya diungkap oleh Ketua Muda Bidang Pidana Umum Adi Andoyo S.H, seolah ingatan masyarakat tentang isu “Mafia Peradilan” terbuka kembali. Seolah memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi jalan terakhir penjaga tegaknya hukum dan keadilan justru mencemaskan hati masyarakat dan memunculkan pemikiran bahwa peradilan kita sedang sakit.

Dalam setiap kasus tentunya hakim menjadi penentu segalanya, dialah pemutus perkara. Dalam perkara tertentu baik dibidang pidana, perdata maupun tata usaha negara tentu naluri setiap pihak yang berperkara ingin dimenangkan oleh hakim, sedangkan kesempatan pertemuan para pihak dengan hakim hanya pada proses persidangan yang terbuka untuk umum, tentulah ini akan memunculkan naluri para pihak untuk dapat menemui hakim diluar sidang peradilan tanpa sepengetahuan pihak lawan.

Menyadarkan para pihak untuk tidak melakukan hal demikian memanglah sulit apalagi bila perkara itu mempunyai nilai uang yang besar,

tak ada satu kekuasaanpun yang dapat melakukannya, semua berada ditangan hakim. Disinilah integritas seorang hakim akan diuji, dapatkah ia menolak permintaan tersebut karena dalam sumpah jabatannya ia tidak diperkenankan memberi janji dan tentunya tidak boleh membuka peluang untuk memberi janji.

Ketika semua itu terlanjur terjadi, maka yang akan terjadi pihak yang berperkara akan memberikan iming-iming uang atau bahkan insiatif dari sang hakim itu. Maka disinilah awal kolusi yang akan disusul korupsi yang akan memancing pihak lain melakukan hal yang sama dan memunculkan situasi kedua pihak akan mengadu atau diadu kekuatan uangnya untuk dimenangkan perkaranya oleh hakim dipengadilan. Tentunya semua kembali lagi ditangan hakim, akankah membuka pintu peluang itu atau menutupnya rapat-rapat.⁵⁸

Dalam semua perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung peran hakim untuk mewujudkan keadilan sangatlah penting karena semua itu didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti halnya tertera dalam pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁹

Lalu masih di undang-undang yang sama dalam I umum, butir 6 dijelaskan

“Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya tergantung dari manusia pelaksana-

⁵⁸ *Ibid*, h. 312

⁵⁹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) h. 34

pelaksananya, ius casu para hakim; maka untuk itu perlulah dalam UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan ini dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun luar”.

Dan dalam penjelasan Umum butir 6, alinea terakhir, selain yang lahiriah terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniah :

“Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan ini dilakukan, “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Disamping itu tanggung jawab para hakim meliputi:

1. Memutus atas nama Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat 1)
2. Memutus sebagai hakim yang bijaksana dan bertanggung jawab pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 14 ayat 1)
3. Mengadili, menemu, dan merumus hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dikalangan masyarakat (Pasal 27 ayat 1)

Dari semua penjelasan pasal-pasal itu menunjukkan betapa luhur dan mulisa penegakan hukum di Indonesia yang didasakan oleh Pancasila ini, namun yang menjadi masalah akankah semua hakim akan mampu memahami makna dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan tersebut. Terutama di Indonesia ini dimana untuk membina aparat hukum yang bersih dan berwibawa yang dianggap masih kurang semuanya kembali kepada pihak-pihak yang berwenang membina kehidupan para hakim.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid,*

C. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai hak politik dan pencalonan legislatif memang bukanlah hal yang baru, Namun terkait penelitian yang menganalisis pertimbangan hakim mahkamah agung terhadap yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 yang ditinjau dari perspektif hukum Islam penulis tidak menemukannya dan dapat dikatakan belum ada yang membahasnya. Dalam kajian pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki unsur yang berkaitan namun berbeda dari sisi ruang lingkup dan masalah yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang membahas mengenai pencalonan legislatif diantaranya adalah skripsi Dewi Fortuna DM yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif. Yang dalam putusan itu berkenaan mengenai dibolehkannya mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan empat syarat, salah satunya pidana penjara hanya sebatas lima tahun, dan yang ditinjau dari fiqh siyasah dalam penelitian tersebut menyatakan sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah tentang perlindungan terhadap hak-hak umat yang wajib dilindungi ketika telah bertaubat, dalam skripsi ini dijelaskan dengan rinci hak-hak politik yang harus dilindungi dan konsep-konsep siyasah

dusturiyah yang berkenaan dengan hak-hak politik dalam pencalonan legislatif yang dimaksud.⁶¹

Selanjutnya Skripsi karya Yulina Windi Agustin yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik". Skripsi ini juga menganalisis tentang pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik sebagian telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang didalamnya juga dibahas secara rinci mengenai prosedur dalam pencalonan legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harus sesuai prosedur yang ada dan dalam penelitian ini juga memaparkan kaitannya dengan Fiqh Siyasah.⁶²

Berikunya adalah skripsi karya Rusdi Riski Lubis yang berjudul "Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)", yang dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR RI dan mekanisme penggantian waktu yang

⁶¹ Dewi Fortuna DM, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

⁶² Yulina Windi Agustin, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), skripsi ini menjelaskan secara rinci mengenai apa itu rangkap jabatan dan segala hal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam hal ini sebagai wujud perwakilan rakyat.⁶³

Semua keterangan diatas menunjukkan bahwa semua penelitian dan karya yang ada memiliki isi bahasan dan spesifikasinya masing-masing dalam lingkup masalah yang dibahas. Perbedaan spesifik dari karya ini adalah dari jenis putusan yang diteliti yaitu terhadap yurisprudensi MA No. 9/P/PAP/2018 tentang pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung atas nama M. Rifa'i yang ditemukan masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri yang mana ia mengajukan perkara pencoretan tersebut kepada Mahkamah Agung atas dasar hak politik nya yang dirasa dilanggar dan pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan M. Rifai, maka dalam skripsi ini menganalisis putusan tersebut dari segi yuridis dan pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari Hukum Islam yakni Fiqh Siyasah khususnya Siyasah Dusturiyah. Karya ini dapat dikatakan sebagai bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang telah ada.

⁶³ Rusdi Riski Lubis yang berjudul “Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 2017)

BAB III

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 9 P/PAP/2018

Gambaran Umum Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 9 P/PAP/2018

Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 28 November 2018, yang telah diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 28 November 2018, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor 9 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berisi pencoretan Pemohon sebagai Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/-XI/2018, tanggal 21 November 2018, dan karena itu Keputusan Termohon tersebut merupakan objek permohonan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

3. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung menyatakan: “Termohon adalah KPU yang menerbitkan Keputusan tentang Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka

KPU Provinsi Lampung mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, karena KPU Provinsi Lampung telah menerbitkan Keputusan Pembatalan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung (dalam hal ini H. Rifa'i, S. H.) yang didasarkan pada Putusan Bawaslu Provinsi Lampung.

4. Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/-XI/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga berdasarkan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang mengadili sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

1. Tentang Pokok Perkara

Salah satu syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat 1 Huruf K Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : *“Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali”*. Sebagaimana ketentuan lain menyatakan :

- a. Pasal 19 ayat (1) Huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pengawas Pemilu melakukan pengawasan penyusunan Daftar Calon Tetap berbasis Daftar Calon Sementara dan/atau daftar pengganti bakal calon dengan memastikan calon yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara menyampaikan

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.

- b. Ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01.4-DS/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang kewajiban mengundurkan diri pada angka 1 bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.¹

Pada tanggal 4 September 2017 Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, lalu Termohon mengumumkan Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018. Setelah itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah 85 bakal Calon Legislatif diantaranya atas nama H. Rifa'i, S.H., Nomor urut 4 Dapil 1 Kota Bandar Lampung.

¹ Putusan Bawaslu Nomor: 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018

Pemohon melengkapi persyaratannya mengenai informasi Bakal Calon dengan surat pernyataan dan hanya mencantumkan informasi pekerjaan sebagai Pensiunan PNS dengan bukti Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan tidak mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direksi BUMD, dalam hal ini sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sampai 1 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap juga belum menyerahkan salinan putusan pemberhentian pemohon sehingga pemohon pun ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan verifikasi data oleh Termohon karena Pemohon tidak mencantumkan pekerjaan aslinya.

Barulah pada tanggal 24 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bandar Lampung mendapatkan temuan tentang dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemohon yang masih menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri (BUMD Kota Bandar Lampung) pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung. Dan pada bulan yang sama Termohon yang dalam hal ini KPU Provinsi Lampung memperoleh informasi yang sama dan mengirimkan Surat Nomor 2284/PL.01.4-SD/03/Prov/x/2018, tanggal 30 Oktober 2018 perihal permintaan Surat Keputusan atas nama pemohon sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung selaku atasan pemohon dan sampai saat ini surat tidak dijawab oleh Walikota Bandar Lampung.

Bahkan dalam laporan temuan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut Bawaslu telah meminta keterangan kepada pihak terkait yang dalam hal ini Saudara Sidik Efendi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Bidang Politik dan Hukum Partai PKS Provinsi Lampung dan diperoleh keterangan bahwa ia tidak mengetahui bahwa saudara pemohon merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung melainkan sebagai pensiunan PNS dan pemohon sendiri mengakui bahwa dirinya masih menerima gaji dari jabatannya sebagai Direktur Utama BUMD Perusahaan Daerah Pasar tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung terakhir dibulan September 2018.²

Berdasarkan fakta tersebut Bawaslu Provinsi Lampung menindak lanjuti temuan dengan menggelar sidang dugaan pelanggaran administratif dengan Terlapor H. Rifa'i, S.H., selaku pemohon tanggal 14 November 2018 dengan keterangan dalam sidang bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dan berkesimpulan bahwa terlapor tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan amar putusan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

² *Ibid*,

Provinsi Lampung untuk menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon melaksanakan kewajiban menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam putusan ini, Termohon mencoret/membatalkan H. Rifa'i, S.H., sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung dari Partai PKS berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung.

2. Pemohon dan Kepentingan Hukum

Pemohon adalah H. Rifa'i., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Damar Gg. Bayur, Nomor 38, RT 006, Perum Kandis, Kecamatan tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki Hak Politik yang sama untuk dipilih dalam pemerintahan merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mencoret/membatalkan pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung yang didasarkan pada Putusan Bawaslu Provinsi Lampung.

Pemohon menganggap Komisi Pemilihan Umum melalui putusannya telah menafsirkan sendiri Amar Putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang tidak ada pemerintahan mencoret Pemohon. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung hanya memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti putusan berdasarkan undang-undang yang berlaku sedangkan dalam pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 36 terkait sanksi terhadap pelanggaran administratif adalah :

- a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa pemohon dalam hal ini telah mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sejak tanggal 9 Juli 2018 dan mengajukannya kepada Walikota Bandar Lampung namun belum juga dikeluarkan Surat Keputusannya oleh pejabat terkait tanpa alasan yang jelas. Dan baru diterbitkan tanggal 12 November 2018 melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandar Lampung. Secara sadar dan bertanggung jawab Pemohon mengakui belum melampirkan syarat SK Pemberhentian tersebut karena lambatnya proses penerbitan.

Pemohon merasa penting menyampaikan kajian teoritis mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3) yang menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, bahwa hak politik memilih dan dipilih merupakan hak asasi dan pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya khususnya hak politik.

Berdasarkan hal tersebut pemohon berpendapat penyelenggara Pemilu di Lampung khususnya Pemilihan Legislatif tidak sejalan dengan semangat KPU RI, yang membuka selebar-lebarnya para calon anggota dewan untuk berkompetisi dengan adil.

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Permohonan

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 531/I.05/HK/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Direktur utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung pada pokoknya menetapkan Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Periode 2017-2019, Keputusan *a quo* mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018. Oleh karena itu, secara yuridis Pemohon telah diberhentikan sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri tersebut sebelum penetapan DCT sebagaimana disyaratkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018. Selain itu, pada tanggal 9 Juli 2018 Pemohon juga telah mengajukan pengunduran diri sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri, jauh sebelum penetapan DCT sebagaimana disyaratkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian secara substantif Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa walaupun pada saat pendaftaran dan satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon belum menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai Dirut PD Pasar Tapis Berseri dikarenakan bukanlah semata-mata kesalahan Pemohon, tetapi karena proses birokrasi pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung, sehingga tidak patut apabila resiko keterlambatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon. Dengan demikian, sepantasnya Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi kembali persyaratan yang kurang tersebut.

Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil Permohonan beralasan hukum, karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya, dengan membatalkan Objek Permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan kembali Pemohon sebagai DCT Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya Termohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Mahkamah agung, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

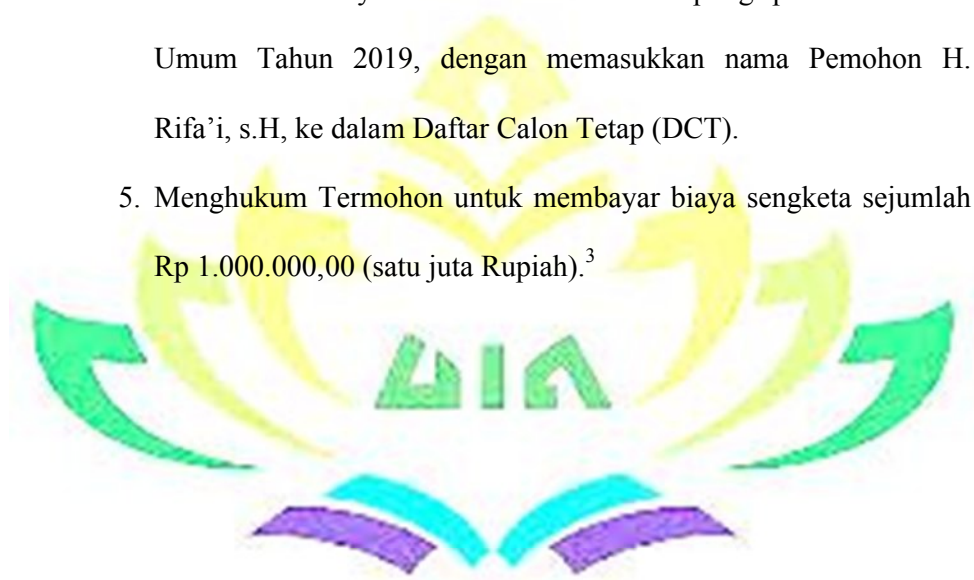
B. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 P/PAP/2018 mengadili dan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan memasukkan nama Pemohon H. Rifa'i, s.H, ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya sengketa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).³



³ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 9 P/PAP/2018

BAB IV

ANALISIS

A. Dasar Pertimbangan Hakim dan Dampak Yuridis dari Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 atas dasar ajuan permohonan yang dilakukan oleh M. Rifa'i akibat dikeluarkannya Putusan KPU Provinsi Lampung yang melakukan pencoretan atas dirinya dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung, sehingga karena Putusan KPU tersebut tidak memungkinkan baginya untuk melanjutkan proses pencalonan pada tahap berikutnya.

Hal itulah yang menjadi dasar M. Rifa'i mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA No. 9/P/PAP/2018 tersebut yang mengabulkan permohonannya untuk membatalkan Putusan KPU dan mengembalikan namanya pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung. Dari putusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan serta pro dan kontra di dalamnya.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim selain dari ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif di Mahkamah Agung juga didasari pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jika melihat latar belakang adanya putusan KPU Provinsi Lampung yang mencoret M. Rifa'i dari Daftar Calon Tetap tersebut alasan utamanya adalah M. Rifa'i sendiri yang ditemukan oleh Bawaslu masih merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung sehingga tentulah hal tersebut ditindak lanjuti oleh KPU karena hal itu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 khususnya Pasal 7 yang memuat ketentuan harus mengundurkan diri salah satunya dari Badan Usaha Milik Daerah seperti yang masih dijabat oleh M.Rifa'i tersebut.

Sedangkan pada pendapat hakim menyanggah hal tersebut salah satunya dengan mendasarinya pada Keputusan Walikota pada tanggal 1 Oktober 2018 yang isinya pemberhentian atas M.Rifa'i sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Periode 2017-2019 yang berlaku sejak 1 Agustus 2018 yang telah sesuai dengan yang disyaratkan pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Namun menurut penulis, dasar hakim tersebut tidak sesuai dan terkesan mengesampingkan fakta-fakta dilapangan yang melatar belakangi

dicoretnya Pemohon dalam Daftar Calon Tetap tersebut. Faktanya adalah dari awal proses pendaftaran yakni tanggal 16 juli 2018 dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan daftar calonnya salah satunya adalah M. Rifa'i selaku pemohon, ia tidak mencantumkan riwayat pekerjaannya sebagai Direksi BUMD tetapi hanya menyatakan dirinya sebagai Pensiunan PNS dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang telah pensiun dari 1 September 2015 sedangkan nyatanya Pemohon juga memiliki status tambahan yakni jabatan pada Direksi BUMD yang tentunya hal tersebut menghalanginya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Terlihat dari proses awal ini dari segi kejujuran pihak pemohon tidak direalisasikan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, bahwa penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum dan lain-lain, khususnya yang menjadi sorotan disini adalah prinsip jujur itu sendiri.

Disini penulis mencoba mengesampingkan fakta rangkap jabatan yang ada pada Pemohon, jika diperhatikan dari jawaban KPU selaku Termohon dalam lembar putusannya, Pemohon yakni M. Rifa'i telah secara lengkap dan sempurna dari segi pendaftaran dan kelengkapan surat meyakinkan pihak Termohon yakni KPU sehingga ditetapkanlah Pemohon pada Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Daftar Calon Tetap, dan sebagai bentuk bahwa Hak Politik dari pemohon oleh KPU telah dipenuhi.

Tentulah sampai pada tahap itu ia dapat melanjutkan pada tahap berikutnya misalnya Kampanye hingga pada tahap pemilihan langsung oleh masyarakat. Jika misalnya pada tahap pemilihan pemohon terpilih dan menjadi Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan tertutupnya fakta rangkap jabatan yang masih pemohon pegang dan dikemudian hari fakta itu muncul tentulah akan menjadi boomerang bagi penyelenggara Pemilu itu sendiri yakni KPU dan Bawaslu dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai kepastian hukum dari peraturan-peraturan yang berlaku dan mencoreng kebersihan Pemilu tentunya. Maka, dengan adanya temuan dari pihak Bawaslu tentang rangkap jabatan tersebut mencegah hal itu terjadi. Disini Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan penemuan yang didapatkannya langsung dari masyarakat dan bentuk tindak lanjut dari KPU yang mencoret pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Lampung merupakan bentuk ketegasan bahwa menjaga kebersihan Pemilu bukanlah hal yang main-main.

Namun pada pertimbangan hakim terkesan tidak memperhatikan hal tersebut, padahal dalam pernyataannya hakim menyebutkan ketentuan syarat pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang berbunyi : “Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.”

Hakim menyatakan itu telah sesuai dengan adanya surat keputusan Walikota Bandar Lampung yang berisi pemberhentian pemohon dari Direksi BUMD sedangkan sehari sebelum penentuan Daftar Calon Tetap pemohon belum menyerahkan surat pemberhentian karena keterlambatan dari pihak Walikota Bandar Lampung. Tetapi hakim menjadikan surat keputusan Walikota Bandar Lampung yang berisi pemberhentian pemohon dari Direksi BUMD tersebut yang baru keluar setelah temuan pelanggaran itu muncul menjadi dasar mengabulkan permohonan pemohon.

Keterlambatan penyerahan surat pengunduran tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai bentuk kesalahan sosiologis yaitu kesalahan pada birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga tidak sepatasnya dibebankan pada pemohon. Tetapi menurut penulis, menyalahkan birokrasi pemerintah dirasa kurang tepat dalam putusan ini karena secara tidak langsung akan makin memunculkan penilaian masyarakat tentang birokrasi pemerintah yang memang sudah buruk dan akan semakin buruk dan tentulah tidak baik adanya, jika dilihat dari bentuk kesalahan, seharusnya dilihat dari bentuk kesalahan yuridisnya yaitu kesalahan pada penerapan pasal.

Jika dalam hal ini KPU disalahkan karena menafsirkan putusan Bawaslu dengan mencoret pemohon dari Daftar Calon Tetap karena menerapkan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

khususnya Pasal 8 dengan ketentuan tidak dapat menyerahkan surat pemberhentian dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka semestinya KPU memberikan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 36 terkait sanksi terhadap pelanggaran administratif. Tetapi itu dikembalikan lagi karena tidak adanya kejujuran di awal proses pendaftaran oleh pihak pemohon hingga ditemukannya pelanggaran tersebut oleh Bawaslu sehingga KPU tidak memberikan perbaikan administratif tetapi melakukan pencoretan.

Terkait berkenaan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam hal ini khususnya Hak Politik, yang oleh pemohon dijadikan dasar permohonan menurut penulis hal tersebut terkesan hanya dijadikan tameng untuk mengkesampingkan fakta-fakta yang ada. Karena secara yuridis, hak politiknya telah dipenuhi oleh KPU dengan dibuktikan pemohon telah sampai pada tahap Daftar Calon Tetap, namun, karena adanya kesalahan pada proses administrasi dan bentuk ketegasan peraturan maka pemohon tidak dapat tetap berada pada daftar tersebut. Sehingga kesalahan dari pemohon tidak dapat ditutupi dengan ketentuan pelanggaran hak politik. Karena keputusan KPU tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari kesalahan pemohon.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung

Pemenuhan hak politik dalam Islam merupakan suatu keharusan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt kepada setiap hambanya sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam firmanNya Surat An-Nur ayat 55 yang mengandung makna bahwa *Khilafa* merupakan karunia dari-Nya dan setiap hambanya memiliki hak yang sama tanpa terkecuali dan pencabutan terhadap hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam pandangan Hukum Islam.

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung yakni Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 yang inti dari putusan itu adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk dikembalikan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan membatalkan putusan KPU sebelumnya yang telah mencoret namanya merupakan realisasi dari apa yang dimaksud dalam Islam sebagai pemenuhan hak politik tersebut, dimana putusan ini telah sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dalam segi hak politik dan persamaan dalam Islam baik persamaan dihadapan undang-undang dan peradilan. Karena perjuangan terhadap hak-hak tersebut merupakan suatu kemuliaan.

Fiqh Siyasah yang merupakan salah satu aspek dalam hukum Islam membahas mengenai pengaturan dan pengurusan negara demi tercapainya kemaslahatan yang dalam hal ini lebih di spesifikasikan pada *Siyasah Dusturiyah* dari segi pengkajian penetapan hukum atau undang-undang,

peradilan dan administrasi yang kesemua itu berkesesuaian dengan konteks negara hukum dalam Islam.

Dengan mengkaji Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 tersebut yang dikaitkan dengan Hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah tentulah jika hanya melihat dari hasil putusan saja tidaklah cukup tetapi perlu ditela'ah juga hal-hal yang melatarbelakangi putusan itu muncul dan alasan-alasan dibelakangnya. Apakah telah berkesesuaian dalam segala aspek atau hanya beberapa aspek saja.

Jika dilihat dari perkara pencalonan legislatif ini, dimana si pemohon yang ditemukan masih memegang jabatan lain pada saat ia telah ditetapkan dalam daftar calon legislatif, karena pada awal pendaftaran ia tidak mengemukakan hal tersebut dan oleh penyelenggara pemilu memberikan sanksi mencoret dirinya karena di rasa melanggar peraturan yang ada, yakni peraturan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 ayat 1 huruf k yang memuat ketentuan kepada anggota calon legislatif harus mengundurkan diri dari jabatan salah satunya pada Badan Usaha Milik Daerah seperti yang dijabat oleh pemohon. Tentulah perlu diperhatikan satu persatu.

Dari segi prinsip kekuasaan sebagai amanah sebagaimana diajarkan dalam *nomokrasi Islam*, melaksanakan amanah yang diembankan pada diri merupakan suatu perintah dan suatu yang mesti dipertanggung jawabkan karena kekuasaan yang dimiliki tentu harus dilaksanakan dengan baik. Disini, jabatan dari si pemohon yang masih dipegang olehnya dan belum

habis masa jabatannya merupakan suatu amanat yang diembannya, namun ia telah memenuhi amanahnya terbukti dengan ia masih melaksanakan tugasnya walaupun ia telah mengajukan pengunduran diri terhadap jabatan yang ia emban dan belum dikeluarkannya surat pemberhentian sehingga ia tidak menyatakannya secara jujur dalam proses awal pencalonan legislatifnya dan pada akhirnya bukti ia masih melaksanakan tugas pada jabatannya itu menjadi serangan balik bagi dirinya karena terendus oleh penyelenggara pemilu dan inilah yang mencoreng kebaikan dari segi pemenuhan amanatnya.

Anggota legislatif atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Ahlul Hilli Wal Aqdi* pada dasarnya merupakan wakil rakyat yang bertugas mengontrol dan mengevaluasi pemerintahan yang mana syarat wajib yang harus ada pada dirinya adalah sifat adil. Adil dianggap sebagai sifat keteguhan pendirian, kesempurnaan tiada akhir dimana memiliki sedikit kesalahan dengan sifatnya menyalahi apa yang dianggap haram dan ketiadaan sifat adil ini menjadi dasar hilangnya keanggotaan pada diri seseorang. Jika dikaitkan dengan perkara si pemohon dalam hal ini, dapat dilihat bahwa ketidak jujuran atau kesan ditutup-tutupi mengenai fakta jabatan lain yang dimiliki olehnya merupakan unsur yang menjadikan tidak terdapat sifat adil padanya sehingga hilangnya keanggotaannya pada daftar calon legislatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara.

Dalam perkara ini baik pihak Pemohon dan Termohon yakni KPU sebagai penyelenggara Pemilu sama-sama meyakinkan dalam pernyataannya keduanya sama-sama merasa benar dihadapan peradilan. Dalam perkara ini tindakan KPU mencoret Pemohon dari daftar pencalonan telah sesuai dengan makna *Siyasah Dusturiyah* terkait pembuatan undang-undang dan peraturan untuk kemaslahatan, karena KPU disini hanya menjalankan tugasnya dan mengikuti peraturan yang telah dibuat, sebagaimana tertera pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tepatnya pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa pencoretan tersebut merupakan bentuk sanksi dari adanya pelanggaran administratif yang ada. Dan hukum yang telah dibuat tentulah harus dijalankan, dan pelanggaran terhadapnya tentulah perlu ditindak lanjuti demi terciptanya kemaslahatan.

Dalam Hukum Islam hakim harus benar-benar mendengarkan keterangan dua pihak yang berperkara tanpa terkecuali agar dapat dengan tepat memberikan keputusan hukum. Dalam perkara ini, nyatanya pihak Pemohon lebih meyakinkan majelis hakim untuk memenangkannya dengan menyatakan poin-poin diantaranya hak politik atas dirinya yang dilanggar dan menyalahkan birokrasi pemerintah Walikota Bandar Lampung yang tidak mengeluarkan surat pemberhentian atas dirinya dengan tidak menyebutkan kealpaan dirinya yang pada proses awal pendaftaran yang hanya melampirkan sebagai pensiunan PNS tanpa riwayat pekerjaan dalam direksi BUMD yang pada nyatanya masih dijalani dan menjadi alasan ia masuk dalam perkara ini.

Hal-hal diatas keseluruhan telah disampaikan oleh pihak Termohon yakni KPU namun dalam perkara ini pertimbangan hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan dalil-dalil yang dikeluhkannya.

Menurut hemat penulis, ketidak jujuran pada awal proses pendaftaran Pemilu dan kesan ditutup-tutupi kesalahan untuk para calon anggota legislatif yang berperkara selain menjadi dasar hilangnya sifat adil dalam keanggotaan *Ahlul hilli wal Aqdi* juga memunculkan sifat kemunafikan yang sangat dilarang dalam Islam yakni apabila berbicara ia berdusta, dan tentulah hal ini harus dicegah, tindakan pencoretan terhadap calon anggota seperti yang disebutkan tentu diperbolehkan dalam islam mengingat bahayanya sifat kemunafikan yang ada yang dikhawatirkan akan terbawa saat mengemban tugas sebagai wakil rakyat yang membawa pengharapan besar untuk kesejahteraan rakyat.

Keadilan dalam Islam merupakan tonggak dari segala tonggak kehidupan, karena penegakan terhadapnya merupakan pengaruh besar keseimbangan kehidupan manusia yang apabila tidak dijaga maka kerusakan yang akan tercipta. Yang menjadi acuan penting adalah ketiga konteks makna keadilan diantaranya : tidak membedakan satu sama lain, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan perharian terhadap hak-hak individu dan memberikannya kepada setiap yang memilikinya.

Dalam perkara ini yakni dalam Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 kurang terciptanya rasa keadilan secara keseluruhan, dimana tidak sesuai dengan poin makna keadilan yang menyatakan keadilan seimbang antara berbagai unsur yang ada, keadilan hanya tercipta untuk pihak Pemohon tanpa melihat latar belakang dalam perkara secara keseluruhan. Bahwa fakta rangkap jabatan ini aduannya berasal dari masyarakat yang merasa hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang melarang hal tersebut, lalu pihak KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang menindak lanjuti perkara ini dalam praktiknya pernyataannya untuk perkara ini keseluruhan dikesampingkan padahal telah disertai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya dalam proses pemilu yang kesemuanya ditimpah dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu undang-undang tentang Hak Asasi Manusi dalam hal ini hak politik yang dibawa oleh Pemohon.

Tentulah dalam hal ini akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat tentang makna kepastian hukum yang ada dalam negara ini, karena peraturan-peraturan yang semestinya ditaati justru dikesampingkan, lalu kebersihan Pemilu yang selama ini mereka yakini ada ternyata dalam praktiknya justru yang melakukan pelanggaran justru dianggap benar. masyarakat pun akan berfikir dan mempertanyakan eksistensi dari adanya lembaga KPU dan Bawaslu yang selama ini selaku penyelenggara Pemilu dan mengawasi jalannya Pemilu dan nyatanya hasil kerja mereka dari bentuk hasil pengawasan dan keputusannya masih dipertanyakan dan

bahkan diperkarakan, lalu untuk apa adanya kedua lembaga tersebut jika masih saja diperkarakan. Ketidak yakinan yang tercipta tersebutlah yang menjadi unsur belum adanya keadilan yang tercipta dari segala unsur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 masih banyak menimbulkan pertanyaan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon memanglah adil untuk Pemohon tapi tidak adil secara keseluruhan, dampak yuridisnya undang-undang Pemilu dan peraturan KPU itu akan diragukan oleh masyarakat tentang kepastian hukumnya, dan memunculkan stigma dimasyarakat bahwa hukum ada untuk dilanggar, serta berdampak pada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang kinerjanya akan diragukan oleh masyarakat luas karena hasil putusannya yang selalu diperkarakan.
2. Dalam pandangan Hukum Islam dari hasil Yurisprudensi MA. No.9 P/PAP/2018 telah sesuai dari pemenuhan hak politik untuk pemohon dan pemenuhan amanat dalam prinsip negara hukum dalam Islam. Hanya ketidak jujuran dari Pemohon pada awal proses pendaftaran menjadi dasar hilangnya sifat adil atau kebersihan atas dirinya sebagai syarat keanggotaan *Ahlul Hilli Wal Aqdi* atau dikenal sebagai Anggota legislatif. *Siyasah Dusturiyah* dalam pemenuhan hak politik harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban karena Islam mengajarkan keseimbangan yang disetarakan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban agar keadilan bagi semua pihak tercipta tanpa terkecuali.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan dari permasalahan pada skripsi ini, maka penulis memberikan rekomendasi:

1. Kepada Pemerintah Untuk melakukan evaluasi kembali terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya begitu banyak memuat pasal ketentuan seputar Pemilu, hal ini nyatanya masih banyak masyarakat yang kurang memahami dari segi isi dan makna dari undang-undang tersebut dan tidak dapat dipungkiri bahwa calon-calon anggota legislatif pun belum memahaminya sehingga menjadi dasar banyaknya pelanggaran yang ada. Serta kejelasan dari sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal yang ada dalam undang-undang Pemilu perlu dipertegas lagi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.
2. Kepada lembaga peradilan di negara ini, perlunya meningkatkan nilai-nilai keadilan secara keseluruhan dalam segala unsur yang ada, dengan tidak hanya terfokus pada satu pihak dan mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada. Dan juga para hakim yang menangani berbagai perkara lebih mendalami lagi terhadap perkara yang membawa unsur undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) karena hal ini sangatlah rentan dan sensitif, jangan sampai kebersihan terhadap undang-undang HAM ini tercoreng karena terkesan dijadikan payung pelindung didepan peradilan untuk menutupi fakta-fakta yang ada.

3. Kepada para personal calon anggota legislatif yang ingin bersaing dalam pemilihan umum untuk menjaga kebersihan Pemilu yang selama ini diserukan oleh penyelenggara pemilu, dengan memegang teguh prinsip Pemilu yakni: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Kejujuran merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mengabdikan dirinya menjadi wakil rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasah, Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*, (Solo: Era Adicitra, 2010)

Alwi, Hasan. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006)

A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015)

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*, (2017)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)

Bismar Siregar, *"Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)

Bunyana Sholihin, *Metodologi penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro, 2010)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta : Amzah : 2005)
- Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta : Erlangga, 2015)
- H. A, H.Z.A, Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977),
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997) h.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Ombak, 2014)
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Madani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)
- Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Human Right in Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008)
- Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan (Terjemah)*, (Surabaya: P. Bina Ilmu)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Poitik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014)
- Mujar Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2005)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)

Sayyid Ahmad Al-Masyimi, *Syarah Mukhyaarul Ahaadiits, Hadis-hadis pilihan berikut penjelasannya*, (Bandung: Sinar Baru, 1993)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam, Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Cet-1, (Jakarta : Bulan Bintang :1975)

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 ayat 47 Peraturan KPU No 9 Tahun 2019

D. Sumber dari Jurnal dan Skripsi :

Aloysius R.Entah, Journal “Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Dewi Fortuna DM, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan

Narapidana Sebagai Anggota Legislatif” (Skripsi, Fakultas Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2017)

Rozali Umar, “*Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Penyelesaiannya*” Makalah disampaikan pada Seminar Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 oleh PERADI dan Bawaslu di Hotel Sheraton, Bandar Lampung (13 April 2019)

Rusdi Riski Lubis yang berjudul “Rangkap Jabatan Sebagai Faktor Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif hidayatullah, Jakarta, 2017)

Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Bana*”, Jurnal, 258 Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 245-270

Yulina Windi Agustin, ”Tinjauan Fiqh Siyassah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

E. Sumber Internet :

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, “*Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*”(On-Line), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (17 september 2019)

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas

“<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>. Di unduh Rabu 13 Maret 2019.

Yurisprudensi(On-Line)”<http://www.pa-subang.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>” (15 Februari 2020)